

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

**Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene
Kepulauan, Sulawesi Selatan**

**Muhammmad Rizal Rahman
Agus Salim
Syafri**

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene
Kepulauan, Sulawesi Selatan
Copyright@penulis 2021

Penulis
Muhammad Rizal Rahman
Agus Salim
Syafri

Editor:
Syamsul Bahri
Aslam Jumain

Tata Letak
Mutmainnah

vi+113 halaman
15,5 x 23 cm
Cetakan: 2021
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-256-0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Teriring rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita curahkan atas segala limpahan Rahmat Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini yang berjudul **“Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan”**. Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian, sehingga diharapkan masukan serta saran dalam membangun untuk penelitian selanjutnya.

Tak lupa pula, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pembimbing penelitian ini, yaitu Bapak Dr. Ir. H. Agus Salim, M,Si dan Dr. Ir. Syafri, M.SI. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan segala keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Makassar, Juni 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Ketimpangan Sosial Ekonomi dalam Pembangunan	1
B. Tantangan Pembangunan Wilayah Pesisir ...	2
BAB II PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH	7
A. Pertumbuhan Ekonomi	7
B. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi	9
C. Kajian Teori Pertumbuhan Ekonomi	10
BAB III KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN	19
A. Ketimpangan Pembangunan	19
B. Penyebab Ketimpangan	20
C. Kemiskinan.....	23
D. Penyebab Kemiskinan	24
E. Ukuran Kemiskinan	28
F. Hubungan Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan	30
G. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan	31
BAB IV STUDI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR	33
A. Gambaran Lokal Studi	33
B. Karakteristik Ketimpangan Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	83

C. Pengaruh Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi	86
Daftar Pustaka	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Ketimpangan Sosial Ekonomi Dalam Pembangunan

Ketimpangan sosial ekonomi adalah adanya perbedaan diantara masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, ketimpangan berdampak pada ukuran ekonomi antar individu/pribadi masyarakat, antar kelompok masyarakat, dan juga antar negara. Kekayaan, pendapatan, dan konsumsi factor ketimpangan sosial ekonomi. Selain itu, terjadinya ketimpangan sosial ekonomi berakibat pada masalah kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan. Seperti ketimpangan lainnya,

ketimpangan sosial ekonomi termasuk juga ke dalam masalah sosial. Sebab, ketimpangan tersebut mengakibatkan kerugian setiap lapisan masyarakat yang ada di suatu wilayah, termasuk Indonesia. Ketimpangan sosial ekonomi Indonesia terbilang parah. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah statistik penelitian, dan laporan yang mengungkapkan hal tersebut. Salah satunya adalah laporan dari Bank Dunia pada tahun 2015 lalu. Menurut laporan tersebut, 74% tanah di Indonesia hanya dimiliki oleh 0,2% persen masyarakat saja. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia sudah menimbulkan dampak yang negatif.

Salah satu faktor utama terjadinya ketimpangan ekonomi adalah keberadaan potensi sumber daya alam suatu wilayah, adanya kondisi demografis yang berbeda, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, adanya perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan

antar wilayah. Salah satu penyebab ketimpangan sosial karena adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya. Faktor penyebab ketimpangan sosial terbagi menjadi dua, yaitu: Faktor internal yang terdiri dari tingkat pendidikan yang kurang maksimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan budaya kemiskinan sedangkan faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Misalnya kebijakan pemerintah atau birokrasi yang membatasi seseorang. Pembatasan tersebut dapat menyebabkan kesenjangan sosial dikarenakan ada sebuah sistem yang menghambatnya.

B. Tantangan Pembangunan Wilayah Pesisir

Kondisi geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan daerah dengan tiga jenis karakteristik wilayah yang berbeda-beda kondisi alamnya (dikenal sebagai daerah tiga dimensi) merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, daerah yang berada pada dataran rendah akan kaya dengan produksi Tanaman pangan, budi daya tambak dan hortukultura, sedangkan untuk daerah yang berada diwilayah kepulauan sangat kaya akan potensi hasil lautnya serta daerah yang berada didaerah pengunungan juga potensi untuk tanaman pangan, sayur-sayuran, kehutanan, pertambangan dan penggalian serta menjadi pusat kegiatan industri khususnya industri semen dan industri batu marmer di kawasan timur Indonesia. Kondisi alam dan sumberdaya yang ada telah menjadikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi salah satu penopang perekonomian Sulawesi Selatan. Adapun persentase kontribusi terhadap jumlah produk domestik regional bruto seluruh

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan (persen) tahun 2012–2016, Kabupaten Pangkep menempati posisi ke 3 (tiga) sebagai wilayah yang memiliki kontribusi sebesar 5,43 % setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Sedangkan, angka kemiskinan Kabupaten Pangkep Tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami trend penurunan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin berjumlah 58.872 jiwa atau 16,62 % namun menurun menjadi 56.400 jiwa namun secara persentase meningkat atau 17,75 % pada tahun 2013. Presentase jumlah kemiskinan di Kabupaten Pangkep hingga tahun 2013 berada di posisi teratas dibandingkan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, sementara diurutan kedua adalah Toraja Utara 16,53 % dan Jeneponto 16,52 %. Pada tahun 2014, data BPS Pangkep menunjukkan masih di posisi tertinggi 16,38 % atau sekitar 52.600 jiwa hingga tahun 2016, tingkat presentase garis kemiskinan di Kabupaten Pangkajene merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 16,22 % . Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu wilayah yang menjadi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Pangkep adalah di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang.

Secara umum, Kabupaten Pangkep memiliki potensi alam yang sangat cukup baik dibandingkan wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya potensi yang dimiliki Kabupaten Pangkep sangat tidak relevan yang terjadi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sjafrizal (2012) bahwa daerah dengan potensi sumber daya alam cukup banyak akan memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah

dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai potensi sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi tersebut tidak mendukung kebijakan yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

Kecamatan Labakkang merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di pesisir pesisir pantai timur Kecamatan Liukkang Tupabiring. Posisi gugusan astronominya antara 40°- 45" lintang selatan dan 11°- 12" bujur timur dan barat. Dengan batas administrasinya antara lain sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ma'rang, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungoro dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Liukang Tupabiring. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Labakkang 98,46 Km², luas wilayah tersebut merupakan 8,85 % dari luas wilayah Kabupaten Pangkep . Secara umum sebagian besar mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang adalah nelayan. Sebagaimana diketahui, keluarga nelayan merupakan seseorang yang mempunyai sumber mata pencahariannya di laut sebagai sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian sebagian besar tingkat pendidikan keluarga nelayan di Kelurahan Pundata Baji masih rendah, sebagian besar lulusan SD dan SMP atau sederajat.

Selain itu juga puluhan warga yang bermukim di kampung nelayan, mengeluhkan sulitnya mendapatkan suplai air bersih. Sehingga warga harus mengantri di depan sebuah bak penampungan untuk mendapatkan suplai air bersih . Dengan demikian pentingnya sebuah kajian terhadap ketimpangan sosial ekonomi masyarakat pesisir di wilayah

Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkep dikarenakan kondisi masyarakat yang sebagian besar memiliki pendapatan yang diperoleh dari bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang semakin bertambah, karena masyarakat tersebut pada umumnya mata pencaharian utamanya yakni menangkap ikan yang pendapatan setiap keluarga dalam sehari tidak menentu sehingga hasil potensi alam yang didapatkan oleh masyarakat tidak dapat bersaing dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Pangkep.

Adanya perbedaan pasar, keterbelakangan infrastruktur dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan berakibat kurangnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berdampak terhadap rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan. Kondisi saat ini tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sangat kontradiktif terhadap pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Pangkep yang merupakan salah satu tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi demikian yang perlunya kajian untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkep .

BAB II

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

A. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2016) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2003) Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonomi klasik,

Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, maupaun ekonom Neoklasik, Robert Solow dan Trover Swan, menyatakan pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: Jumlah

penduduk, Jumlah stok barang modal, Luas tanah dan kekayaan alam, Tingkat teknologi yang digunakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada sebelumnya. Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Menurut Todaro dalam Arsyad (2016) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan

kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara- cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisonal. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- 2) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
- 3) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

B. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan;

G = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

C. Kajian Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama Model Pertumbuhan Neo-Klasik (Boediono,1992). Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan

penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam model neo-klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya.

Sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978) dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis (Sjafrizal, 2008) :

$$Y = A K^{\alpha} L^{\beta} , \alpha + \beta = 1 .$$

dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga kerja. Karena analisa munculkan pertumbuhan maka semua variabel adalah fungsi waktu (t).

2. Teori Ketimpangan

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh

Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Model neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar, akibatnya modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan cenderung melebar. Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju, maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik Sjafrizal (2008: 104- 105).

Dalam hipotesis neoklasik ketimpangan pembangunan pada permulaan proses cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Dengan kata lain ketimpangan pada negara berkembang relatif lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut relatif lebih rendah. Ketimpangan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik sedangkan daerah yang

masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Oleh sebab itulah, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat didaerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

3. Ketimpangan Pembangunan Daerah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Menurut Sjafrizal (2008:107), indeks ketimpangan Williamson adalah analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional, dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, dimana

semakin mendekati nol artinya ketimpangan kecil atau semakin merata. Sedangkan apabila mendekati angka satu maka ketimpangan daerah yang diteliti semakin tinggi.

5. Kemiskinan

Pengertian atau definisi mengenai kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Akan tetapi Kuncoro mendefinisikan bahwa konsep kemiskinan sebagai perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.

Lebih lanjut Michael Parkin mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan rumah tangga terlalu rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka kesulitan untuk dapat membeli makanan, rumah dan pakaian yang mereka butuhkan setiap hari. World Bank memberikan kategori orang yang dapat dikelompokkan ke dalam miskin adalah orang yang per harinya pendapatannya kurang dari USD 2 sehari. Definisi ini berbeda dengan yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia, kemiskinan diukur dengan menghitung kebutuhan pangan seseorang dalam sehari, diukur dengan satuan kalori kemudian dikalikan dengan harga.

Sedangkan definisi mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah menurut hipotesa Neo Klasik dalam Sjafrizal (2012) proses pembangunan ekonomi yang

terjadi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya dan dapat mengarah kepada ketimpangan ekonomi antarwilayah. Menurut hipotesa Neo Klasik tersebut pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan akan menjadi rendah.

Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf U terbalik. Kebenaran Hipotesis Neo Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson dalam Sjafrizal (2012) melalui studi yang dilakukan pada tahun 1966 tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross-section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya.

Mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah dalam suatu negara atau daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan perdebatan yang panjang.

Namun pada umumnya metode yang lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah dengan menggunakan metode Indeks Williamson. Dalam ilmu statistik, indeks ini adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang pertama kali menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah,

Simon Kuznet menghubungkan laju pertumbuhan sebagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data time series untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta data cross section yang mencakup tiga negara tersebut ditambah negara India, Srilangka, serta Puerto Rico dan hasil pengamatan tersebut Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahapan perkembangan (diwakili dengan PDB per kapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti yang digambarkan oleh hipotesis U terbalik, sebagian besar didasarkan pada model pembangunan dualistik Yusuf, et al. dalam penelitiannya mengenai ketimpangan pembangunan regional di Indonesia pada tahun 2014 mengatakan bahwa dengan mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah. Pengembangan potensi dari sektor unggulan dari masing-masing daerah harus dapat ditingkatkan di masing-masing daerah, sehingga berdasarkan pengembangan potensi sektor

unggulan tersebut dapat memacu pembangunan daerah dan pada akhirnya dapat mengakselerasi pengurangan kemiskinan.

Lebih lanjut menurut Aritenang, mengatakan bahwa dengan pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi perlu meningkatkan pertumbuhan GDP per kapita. Dengan peningkatan GDP per kapita tersebut, maka provinsi-provinsi tersebut dapat memacu konvergensi dan mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah. Pengurangan ketimpangan pembangunan berarti dapat diartikan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan level pembangunan manusia, peningkatan investasi yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Purnamasari (2010) melakukan penelitian mengenai kesenjangan pendapatan regional antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2001-2008 dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson dan model data panel. Indeks Ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan serta menganalisa tren kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota. Berdasarkan Indeks Ketimpangan Williamson periode tahun 2001-2008 kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tergolong dalam indeks yang tinggi.

BAB III

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN

A. Ketimpangan Pembangunan

Menurut (Hartono, 2008). Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan, ada Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat.

Menurut Todaro (2004), Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses

pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil.

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

- Y_i = PDRB per kapita daerah i
- Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
- f_i = Jumlah penduduk daerah i
- N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

B. Penyebab Ketimpangan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008), adalah:

a. Faktor Geografis

Suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumberdaya mineral dan variasi spasial lainnya. Apabila faktor-faktor lainnya baik dan ditunjang dengan kondisi geografis yang lebih baik dari daerah lain, maka wilayah tersebut akan berkembang lebih baik daripada daerah lain.

b. Faktor Historis

Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan atau budaya hidup yang telah dilakukan di masa lalu. Bentuk kelembagaan, budaya atau kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem intensif terhadap kapasitas kerja.

c. Faktor Politis

Tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi suatu wilayah tidak akan berkembang. Bahkan pelarian modal keluar wilayah untuk diinvestasikan ke wilayah yang lebih stabil.

d. Faktor Kebijakan

Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik di beberapa sektor dan lebih menekankan pertumbuhan dan pembangunan pada daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pembangunan di wilayah

tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antar daerah.

e. Faktor Administratif

Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan pengelola administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju. Sehingga dapat dikatakan wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih yang berarti sama dengan mempunyai sumberdaya manusia yang lebih baik.

f. Faktor Sosial

Masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang rendah cenderung akan menghambat perkembangan ekonomi. Sebaliknya masyarakat maju memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang.

g. Faktor Ekonomi

Beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi dari berbagai faktor ekonomi. Wilayah yang mempunyai faktor-faktor ekonomi yang baik, mendorong untuk menjadi daerah yang lebih maju, dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sedangkan daerah lainnya akan tertinggal.

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Renggapratiwi, 2009).

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers dalam Suryawati (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan, 2) ketidakberdayaan, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat 4) ketergantungan, dan 5) keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Kuncoro (2003) Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai "ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum". Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai,

kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas 2004).

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai, pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta rendahnya tingkat pendidikan.

D. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan

pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

Menurut Todaro (2003) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut :

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.

- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Kartasasmita dalam Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

- a. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

- b. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

- c. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

- d. Kondisi Keterisolasian

- e. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti:

- a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya
- c. pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
- d. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.
- e. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
- f. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
- g. Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh

terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

- h. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
- i. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
- j. Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
- k. Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
- l. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

E. Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah) dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan

status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Secara sederhana dan umumnya ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

F. Hubungan Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan

Miller (Arsyad, 2006) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan layaknya satu unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena adanya ketimpangan social dalam suatu wilayah. Dimana sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dan lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil atau malah tidak mendapatkannya. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama di daerah berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasikan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Datt dan Ravvalin (1990) menekankan bahwa salah satu pengetasan kemiskinan disuatu daerah adalah dengan menghilangkan ketimpangan antarwilayah yang terjadi, karena ketimpangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong terciptanya kemiskinan.

G. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet dalam Tambunan (2014) memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Selanjutnya menurut penelitian Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Menurut Siregar (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan peran pemerintah yang cukup efektif mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur.

BAB IV

STUDI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR

A. Gambaran Lokasi Studi

1. Tinjauan Wilayah Kabupaten Pangkep

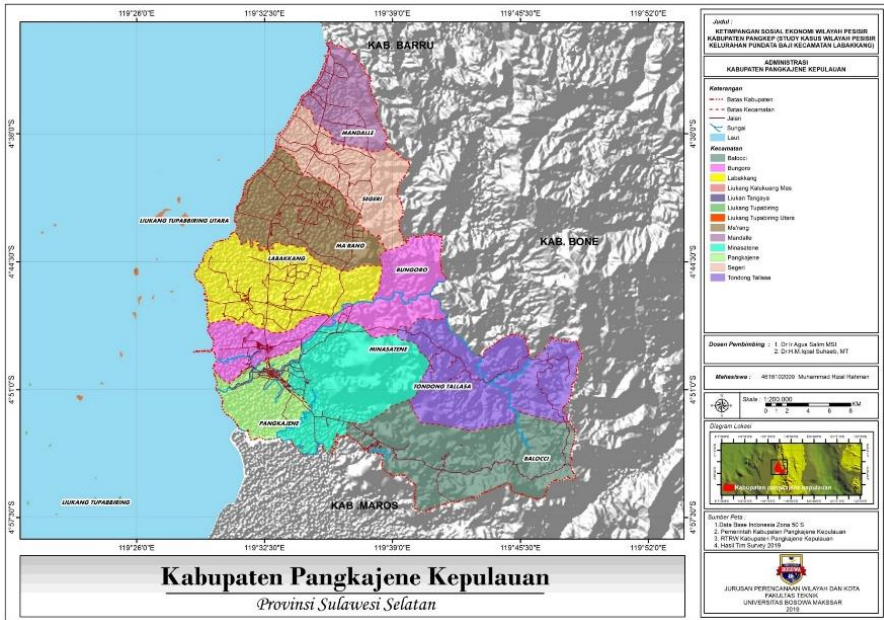
Pada bagian ini akan ditinjau berbagai aspek yang menyangkut potensi wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, yang meliputi; tinjauan letak geografis wilayah, tinjauan kependudukan dan tinjauan potensi wilayah. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui survey lapangan, maupun melalui instansi-instansi yang terkait, sehingga data dapat dijabarkan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik dan peta. Adapun kajian data yang dimaksud, sebagaimana pada pembahasan berikut;

1) Tinjauan Letak Geografis Wilayah

Kepulauan, meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Luas wilayah sebesar 12.311,43 Km² yang terdiri dari 898,29 Km² wilayah daratan dan 11.464,44 Km² wilayah kepulauan, dimana meliputi 13 kecamatan dengan 104 kelurahan/desa, Dengan batas wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan wilayah Kabupaten Barru
- Sebelah Timur berbatasan wilayah Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan wilayah Kabupaten Maros
- Sebelah Barat berbatasan wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan sehingga membentuk karakteristik wilayah yang memiliki potensi sangat besar, untuk lebih jelasnya sebagai berikut;



Gambar 4.1. Peta Administasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Wilayah Daratan

Secara umum wilayah daratan Kabupaten Pangkep ditandai dengan potensi yang sangat mendukung disektor pertanian dan perikanan dimana memiliki potensi dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, potensi yang cukup besar tersebut terdapat pada wilayah daratan yaitu terdapatnya sumber daya alam berupa hasil sumberdaya alam, seperti batu bara, marmer, karst dan semen. Disamping itu, terdapat potensi disektor pariwisata yang mampu menambah pendapatan daerah dan masyarakat Kabupaten Pangkep.

Secara administrasi, kecamatan yang berada pada wilayah daratan terdiri dari Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Balocci, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, dan Kecamatan Mandalle, Kecamatan Minasa Te'ne,

- Wilayah Kepulauan

Secara umum, wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah kepulauan cukup banyak di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan baik disektor perikanan maupun pariwisata dalam rangka mendukung peningkatan sektor ekonomi wilayah Kabupaten Pangkep. Adapun kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkep yaitu: Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangayya.

2) Tinjauan Topografi Wilayah

Topografi Wilayah Kabupaten Pangkep terletak pada ketinggian 100 - 1000 m di atas permukaan laut, kondisi topografi yang relatif bervariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu;

- a) Dataran rendah (0-25 Mpdl) sebagian besar terletak di Kecamatan Labakkang, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Bungoro, dan Kecamatan Mandalle.
- b) Dataran Tinggi (25-100 Mpdl) terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara.

- c) Dataran Pegunungan (500-1000 MpdI), sebagian besar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada bagian timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- d) Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pada Kecamatan Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Mandalle dan Segeri serta kecamatan kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang tergolong sebagai daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tupabiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas

Secara garis besar kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi dalam 4 (empat) kategori wilayah yaitu dimana berdasarkan data hasil penelitian Laporan Geologi Terpadu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Klasifikasi pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yaitu sebagai berikut:

- Wilayah Sudut Lereng 0-2 %
- Wilayah Sudut Lereng 2-15 %
- Wilayah Sudut Lereng 15-45 %
- Wilayah Sudut Lereng > 45 %

Tabel 4.1.
Klasifikasi Sudut Lereng di Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan

No.	Sudut Lereng (%)	Ketinggian Diatas Muka Laut (MpdI)	Bentangan dan Batuan Penyusun	Sebaran (Kecamatan)	Jenis/Peruntukan Lahan
1	0-2	0-25	Gamping, lava/breksi, endapan alluvium	Mandalle, Segeri, Ma'rang, Labakkang, Bungoro, Pangkajene	Persawahan Pertambakan Perkebunan Permukiman Pertambangan
2	2-15	25-100	Gamping, lava/breksi, Basal, Komplek melage, Malihan, Kars dan Sedimen Flis	Mandalle, Segeri, Bungoro, Minasate'ne, Tondong Tallasa, Balocci	Perkebunan Peternakan Permukiman Hutan Belukar Alang-Alang
3	15-45	100-500	Gamping, Sedimen, Lava/breksi, Tufa, Konglomerat, Perbukitan Kars, Basal, Malihan dan Trakit	Mandalle, Segeri, Bungoro, Minasate'ne, Tondong Tallasa, Balocci	Perkebunan Hutan Lindung Semak Belukar Peternakan Permukiman
4	>	500-1000 (puncak)	Lava/breksi, Tufa, Konglomerat, Gamping, Ultra Basa dan Basal, Retas Basal Batu Gamping, Lava dan Breaksi	Mandalle, Segeri, Bungoro, Ma'rang, Tondong Tallasa, Balocci, Minasate'ne	Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Perkebunan Rekreasi Pertambangan Permukiman

Sumber : Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pangkep 2017-2021

3) Tinjauan Geohidrologi Wilayah

Keadaan hidrologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan hasil kondisi lapangan dibedakan antara lain permukaan (sungai, rawa dan sebagainya) dan air yang bersumber di bawah permukaan (air tanah). Air di bawah permukaan yang merupakan air tanah adalah sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara umum, Kabupaten Pangkep dialiri oleh 5 (lima) sungai yang cukup besar dan mengalir dari timur ke barat Kabupaten Pangkep, sungai yang terpanjang adalah sungai Tabo-Tabo, sungai yang terdapat di Kabupaten Pangkep semuanya langsung bermuara kelautan, sehingga airnya masih dipengaruhi oleh kondisi pasang surut. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah dan panjang sungai dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 4.2.

Jumlah Sungai Dirinci Menurut Panjang, Kecamatan Yang Dilintasi dan Luas DAS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Nama Sungai	Kecamatan Yang Dilintasi	Panjang Sungai (Km)	Luas DAS (Km ²)
1	Tabo-Tabo	Pangkajene, Bungoro, Minasate'ne Labakkang	50	208,50
2	Segeri	Segeri	33,50	117,00
3	Leang Lonrong	Balocci, Minasate'ne	8	25,00
4	Bantimala	Tondong Tallasa, Bungoro	8	44,00
5	Binanga Sangkara (Kalibone)	Minasate'ne	5	61,00

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2017

Potensi sumber daya air permukaan pada aliran sungai, selain dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk keperluan air minum dan rumah tangga, juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk kegiatan industri. Potensi sumber daya air selain dari aliran sungai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat juga diperoleh dari :

- Air Tanah Dangkal

Air tanah dangkal sampai saat ini dimanfaatkan petani dengan pembuatan sumur-sumur sementara untuk sumber air bagi pertanian dan hortikultura sayuran. Penggunaan air tanah dangkal secara terbatas oleh petani belum berdampak negatif, namun apabila penyedotan air tanah dengan pompa mesin, maka perlu diantisipasi dari sekarang. Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 6 (enam) lokasi mata air dan 3 (tiga) lokasi diantaranya durap untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku air bersih. Ketiga sumber mata air ini

dikelola oleh PDAM setempat untuk keperluan air minum (air bersih).

- Air Tanah Dalam

Air tanah dalam yang berada > 60 M dibawah permukaan tanah yang disebut aquateer banyak terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, namun sampai pada saat ini belum ada informasi data tentang berapa besarnya potensi air yang ada di lapisan aquateer. Cadangan air tanah dalam yang disedot dengan sumur pipa yang dalam bentuk air tanah dalam oleh PU pengairan telah diinformasikan keberadaannya namun secara pasti belum ada datanya.

Potensi air tanah dalam pada khususnya di daerah dataran rendah bagian barat wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat dibagi menjadi 6 (enam) berdasarkan sebaran ke dalam lapisan pembawa air yaitu:

- Potensi air tanah kedalaman 25 meter, tahapan lapisan batuan 11-62 ohm- meter.
- Potensi air tanah kedalaman 50 meter, tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter. Potensi air tanah pada kedalaman 75 meter tahapan jenis lapisan batuan 12-75 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 100 meter tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 125 meter tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.
- Potensi air tanah pada kedalaman 150 meter tahapan jenis lapisan batuan 15-86 ohm-meter.

Data dan informasi mengenai sebaran sumber air tidak terdata dengan baik, sehingga tidak dapat diberikan gambaran secara statistik, namun berdasarkan pengamatan saat survey lapangan, maka dapat diberikan gambaran

mengenai sebaran sumber air. Sebaran sumber air permukaan berupa danau atau waduk. Pada daerah sepanjang wilayah pesisir air tanah dapat diperoleh dengan kedalaman 2-8 meter, namun kondisi air terkontaminasi oleh intrusi air laut, sedangkan pada daerah dataran tinggi air tanah dapat dijumpai secara bervariasi antara 8-25 meter, namun pada daerah yang terdapat di sekitar pegunungan seperti Balocci dan Tondong Tallasa sumber air masyarakat diperoleh dari pegunungan.

4) Tinjauan Geologi Wilayah

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 4 (empat) bagian besar dari kondisi struktur geologi yang menyusun tanah dan batuan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dan informasi tentang kondisi geologi sangat penting artinya dalam memanfaatkan lahan dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batuan yang terkandung di dalamnya. Adapun struktur geologi batuan yang terdapat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

- a) Endapan Permukaan : jenis endapan permukaan ini berupa jenis tanah alluvial, daerah rawa, endapan pantai, delta dan daerah aliran sungai.
- b) Batuan Sedimen : jenis batuan sedimen meliputi batuan berpasir, batuan kerikil, kerakal konglomerat, batuan berlempung, batuan lanau, napal, tuvaran, lava dan breksi.
- c) Batuan sedimen bercampur batuan gunung api : jenis struktur batuan ini terbentuk dari formasi camba : terdiri dari batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api, breksi, lava, tufa, konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batuan napalm alihan.

d) Batuan Terobosan : jenis struktur batuan ini terdiri dari terobosan bersifat basa terutama batuan terobosan yang bersifat asam dan menengah, meliputi granodiamit diorite, tralit, dan batuan baku terobosan bersifat ultra basa terutama pridotil.

Secara garis besar sebaran dari jenis struktur geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari :

- a) Jenis endapan permukaan tersebar secara tidak merata pada sepanjang wilayah bagian pesisir.
- b) Jenis batuan sedimen tersebar secara tidak merata pada bagian wilayah dataran rendah.
- c) Jenis batuan sedimen berselingan gunung api dan batuan terobosan sebagian besar tersebar di dataran tinggi terutama di Kecamatan Balocci, Ma'rang dan Tondong Tallasa. Berdasarkan struktur geologi, maka terdapat berbagai jenis bahan tambang, seperti basal, batu gamping, batu sabak, diorite, tras, kaolin, lempung, feldspar, marmer, batu bara dan lain-lain. Bahan galian ini tersebar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kondisi geologi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal sesar yaitu pada bagian daratan terdiri atas : foliasi perlipatan, sesar dan kekar dengan arah umum foliasi arah barat laut tenggara miring ke arah timur laut antara 20o - 60o, sumbu perlipatan berarah utara selatan dan barat laut tenggara berupa antiklin tidak simetris, dan sesar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri atas sesar normal dan sesar geser.

5) Tinjauan Klimatologi Wilayah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kondisi tipe iklim ini menjadi iklim tipe C1 dengan bulan kering < 2 bulan, iklim

tipe C2 dengan bulan kering 2-3 bulan, dan iklim dengan bulan kering 3 bulan. Keduanya memiliki bulan basah antara 5-6 bulan secara berturut-turut dalam satu tahun dengan curah hujan rata-rata 2.500-3.000 mm/tahun. Tipe ini merupakan tipe iklim Tropis basah.

Temperatur udara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kisaran 210 – 310 atau rata-rata suhu udara 26,4 0C. Keadaan angin berada pada kecepatan sedang, dimana pada daerah ketinggian kelembaban udara rendah sedangkan pada wilayah pesisir kelembaban udara tinggi.

Selanjutnya untuk data Resiko Bencana Alam Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijelaskan sebagai berikut: Secara geografis letak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bukan daerah yang memiliki gunung berapi dan tidak berada pada garis patahan bumi, namun bencana- bencana yang berskala kecil tetap ada dan membutuhkan penanganan yang tepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik kerugian harta maupun jiwa. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Angin Topan/ Angin Puting Beliung;
- Banjir
- Gelombang Ekstrim;
- Abrasi;
- Tanah Longsor;
- Kekeringan; dan
- Kebakaran Hutan.

Kejadian Bencana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Kejadian Bencana Di Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Tahun 2011-2015

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
2011	Angin Puting Beliung	-	100 kali
	Banjir	-	ribuan hektar sawah
	Abrasi	Daerah Pesisir Kepulauan	
	Banjir Bandang	Kelurahan Balleanging	4 korban jiwa dan
		Kecamatan Balocci	puluhan rumah rusak berat
2012	Angin Puting Beliung	Kecamatan Pangkajene	Kerusakan 23 unit rumah
		Kecamatan Labakkang	Kerusakan 60 unit rumah
		Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	Kerusakan 24 unit rumah
		Kecamatan Liukang Tupabbiring	Kerusakan 43 unit rumah
		Kecamatan Ma'rang	Kerusakan 99 unit rumah
		Kecamatan Minasatene	Kerusakan 13 unit rumah
		Kecamatan Bungoro	Kerusakan 1 unit rumah
		Kecamatan Segeri	Kerusakan 21 unit rumah
		Kecamatan	Kerusakan 95 unit

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
		Mandalle	rumah
		Kecamatan Liukang Kalmas	Kerusakan 19 unit rumah
2013	Longsor	Kecamatan Balocci	37 rumah
	Angin Puting Beliung	Kecamatan Minasatene	170 rumah
		Kecamatan T. Tallasa	23 rumah
		Kecamatan Balocci	196 rumah
		Kecamatan Bungoro	201 rumah
		Kecamatan Pangkajene	173 rumah
		Kecamatan Labakkang	257 rumah
		Desa Kanaungan	15 rumah
		Desa Gentung	2 rumah
		Kel.Pundata Baji	1 Sekolah
		Kecamatan Ma'rang	31 rumah
		Kel.Talaka	4 rumah
		Kel. Bonto-Bonto	4 rumah
		Kecamatan Segeri	113 rumah
		Kecamatan Mandalle	52 rumah
		Kecamatan	108 rumah

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
		Liukang Tupabbiring	
		Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	37 rumah
		Kecamatan Liukang Tangaya	64 rumah
		Kecamatan Liukang Kalmas	53 rumah
	Banjir	Kecamatan Minasatene	63 rumah
		Kecamatan Balocci	45 rumah
		Kecamatan Pangkajene	900 rumah
		Kecamatan Bungoro	Kerugian 200 Ha Sawah, 50 Ha Tambak 1.000 rumah
		Kecamatan Ma'rang	1.112 Ha Sawah, 21 Rumah
		Kecamatan Mandalle	26 rumah
2014	Angin Puting Beliung	Kecamatan Balocci	55
		Kecamatan Minasatene	56
		Kecamatan Pangkajene	90
		Kecamatan	11

Tahun	Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Keterangan
		Bungoro	
		Kecamatan Labakkang	16
		Kecamatan Ma'rang	16
		Kecamatan Segeri	97
		Kecamatan Mandalle	164
		Pulau Satando	25
		Pulau Gondong Bali	7
	Banjir	Bendungan Tabo-tabo	Perkiraan Kerugian Rp.10.000.000.000,-
2015	Angin Puting Beliung	Kec. Labakkang	24 Rumah Rusak
		Kec. Minasate'ne	47 Rumah Rusak
		Kec. Mandalle	63 Rumah Rusak
		Kec. Pangkajene	57 Rumah Rusak
		Kec. Bungoro	6 Rumah Rusak
		Kec. Tondong Tallasa	26 Rumah Rusak
		Kec. Segeri	1 Rumah Rusak
		Kec. Ma'rang	1 Rumah Rusak
		Kec. Balocci	3 Rumah Rusak

Sumber: Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pangkep, 2017-2021

Angin puting beliung terjadi pada musim pancaroba dari musim penghujan ke musim kemarau, begitu pula sebaliknya

akibat adanya perbedaan tekanan udara yang sangat cepat dari daratan yang panas lalu ke atas dengan suhu uap lebih dingin. Dalam kondisi dinamika atmosfer yang tidak stabil peluang angin puting beliung sangat besar terjadi.

Potensi terjadi banjir juga akan terjadi dan menjadi ancaman bagi masyarakat, tidak hanya bahaya banjir bandang tapi juga disebabkan oleh laut pasang dan buruknya kondisi drainase akibat hujan yang turun terus menerus. Begitupun ancaman bahaya tanah longsor akan terjadi bila penebangan pohon secara liar tidak terkendali dan penambangan galian tambang secara berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan lereng atau berat berlebihan yang harus ditanggung lereng.

a) Wilayah lokasi bencana alam

Beberapa wilayah lokasi bencana alam di Pangkep yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- Kawasan yang sering terjadi banjir, terutama Daerah-daerah yang dilewati oleh aliran sungai yaitu di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Segeri, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Ma'rang dan Kecamatan Mandalle.
- Daerah Rawan Angin Puting Beliung, di Kecamatan Minasatene, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas.

b) Bencana Yang Timbul Akibat Kesalahan Manusia

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi sebagai berikut:

- Daerah rawan kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan rusak.
- Daerah rawan kebakaran, antara lain: Kecamatan Minasatene, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Balocci dan Kecamatan Segeri.
- Daerah rawan longsor, terutama di Kecamatan Balocci dan Kecamatan Tondong Tallasa
- Daerah rawan abrasi, terutama di wilayah pesisir dan wilayah kepulauan.

6) Isu-Isu Strategis Wilayah

Untuk Isu-Isu Strategis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang terkait pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta khususnya mengenai capaian pelayanan dan kualitas dijelaskan sebagai berikut:

a) Isu Strategis Sektor Pengembangan Permukiman (Bangkim)

Pengembangan Permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, perkotaan, dan desa Nelayan. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana (infrastuktur) Permukiman di kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa / Desa Pusat Pertumbuhan dan pada Desa terpencil / Desa tertinggal melalui program pemberdayaan masyarakat.

Setiap Kabupaten/Kota perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis didaerahnya, berikut penjabaran isu-isu strategis pengembangan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut;

- a) Peran dan Fungsi dari PKW Pangkajene sebagai tempat pemusatan berbagai aktivitas wilayah, seperti pemusatan permukiman perkotaan, pusat pelayanan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan, tentunya memerlukan pendekatan pola penanganan yang lebih terpadu, terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan guna mewadahi aktivitas masyarakat dalam satu tatanan pengaturan pemanfaatan ruang yang harmonis, nyaman, dan produktif, sehingga dalam mengelola kawasan perkotaan Pangkajene ini perlu melibatkan berbagai sektor pembangunan. Penting bagi kawasan perkotaan ini menjadikan bidang ke-ciptakarya sebagai katalisator penciptaan lingkungan perkotaan yang layak huni.
- b) Alokasi realisasi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada Kawasan Perkotaan Pangkajene ini belum mampu mengatasi secara signifikan permasalahan-permasalahan di seputar permukiman perkotaan, terutama kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Kedudukan Kawasan Perkotaan Pangkajene baik secara geografis maupun dalam tatanan kebijakan spasial nasional dan provinsi yang menempatkannya sebagai pusat pelayanan regional (Pusat Kegiatan Wilayah; PKW) dalam berbagai kegiatan pembangunan, jelas ini menjadi faktor kuat menarik arus penduduk masuk ke kawasan ini.
- d) Orientasi kawasan perkotaan pada Kawasan Perkotaan yang layak huni., dimana berkembang kelompok permukiman nelayan yang kondisinya cukup memprihatinkan utamanya dari aspek prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang terdapat di

pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- e) Kawasan perkotaan Pangkajene menjadi pusat distribusi pergerakan lintas provinsi melalui jalur Lintas Barat, yang tentunya menjadikan kawasan ini sebagai tempat transit bagi pelintas di jalur trans Sulawesi tersebut.

Prioritas pembangunan permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan tertuju pada Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasatene dan Kecamatan Bungoro sebagai prioritas utama dalam pembangunan strategis kawasan perkotaan di Kabupaten. Peningkatan kualitas permukiman tersebut dilakukan dengan peningkatan infrastruktur permukiman, seperti pembangunan prasarana jaringan jalan lingkungan, peningkatan pelayanan air minum, pembangunan sistem pengelolaan limbah/ sanitasi lingkungan, serta pengelolaan persampahan. Pembangunan dari komponen sektor keciptakaryaannya tersebut akan menjadi tolak ukur peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh perkotaan.
- b) Pembangunan infrastruktur perdesaan, Program pembangunan infrastruktur perdesaan diarahkan kepada desa-desa tertinggal dan pengembangan wilayah kecamatan terisolir dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, sasaran yang dicapai adalah menyeluruh di 13 kecamatan.

Kondisi prasarana dan sarana permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara kuantitas menyebar baik dipertanian maupun di daerah pedesaan seperti peningkatan kualitas lingkungan perumahan kota, pembangunan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan jalan/jembatan desa, ketersediaan air minum dan sanitasi serta fasilitas umum lainnya. Ditinjau dari tingkat penyediaan PSD masih menunjukkan adanya indikator keterbatasan berkaitan dengan tingkat kebutuhan pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah pedesaan.

Program/kegiatan pembangunan permukiman berdasarkan tingkat permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik perkotaan maupun di pedesaan seperti peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan/nelayan, pembangunan infrastruktur pedesaan, yang lebih baik diprioritaskan pada desa-desa tertinggal dan pengembangan wilayah kecamatan terisolir.

b) Isu Strategis Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)

Penanganan tata bangunan dan lingkungan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan melalui kebijaksanaan pemberian surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Demikian pula dengan tidak tertibnya garis-garis sempadan bangunan menurut peruntukannya serta pemanfaatan ruang yang tidak terkendali baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan terlihat pembangunan dan pemanfaatan lahan dilakukan pada kawasan non budidaya seperti pada kemiringan lahan >40%, dikawasan pantai dan pinggiran sungai sehingga sering terjadi bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya.

Isu Strategis Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijelaskan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Tradisional/Bersejarah
- Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
- Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Adapun penjelasan Isu Strategis sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), dapat dijelaskan dibawah ini:

- Kebutuhan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh;
Permukiman kumuh adalah permukiman yang kualitas lingkungannya kurang layak dihuni karena berada pada lahan yang sangat tidak sesuai dengan peruntukan ruang, kepadatan dalam luasan sangat tinggi, kualitas bangunan kurang memadai dan kurang terlayani prasarana lingkungan yang baik. Upaya penataan kawasan kumuh tidak hanya pada aspek fisik saja tetapi juga melalui Konsep TRIDAYA/bersejarah tersebut.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Tradisional/Bersejarah;
Kawasan tradisional/bersejarah memiliki refleksi nilai budaya yang tinggi. Disisi lain kawasan disekitarnya seringkali dijumpai tidak tertata dengan baik bahkan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Demi menjaga kelestarian nilai budaya dari masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dibutuhkan upaya revitaliasasi kawasan tradisional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- **Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara**
Merupakan kegiatan berupa pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan baik fisik maupun administrasi dari Gedung-gedung dan Rumah-rumah negara. Pada pelaksanaan pemerintah pusat mendorong peran pemerintah daerah berkomitmen dalam pengelolaan GRN. Kegiatan-kegiatan utama GRN terdiri Kegiatan Pembinaan Teknis dan kegiatan fisik.
- **Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan;**
Masalah kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah sangat mendesak untuk ditangani khususnya di Perkotaan. Satu ciri umum dari kemiskinan adalah minimnya infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memperkuat kelembagaan masyarakat dan menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) Kabupaten Pangkep.

c) **Isu Strategis Sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Cakupan pelayanan air minum dengan perpipaan maupun non perpipaan rendah, sehingga diperlukan pembangunan jaringan sistem air minum baru dalam rangka menambah jumlah masyarakat yang mendapat pelayan air minum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

- Pembangunan jaringan sistem Penyediaan Air Minum di Ibukota Kecamatan (IKK)
- Pembangunan jaringan sistem Penyediaan Air Minum di Kawasan Rawan Air yang berpenduduk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- Pembangunan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dikawasan pesisir atau Nelayan
- Pembangunan jaringan sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat di Perdesaan

Cakupan eksisting pelayanan sektor air bersih/air minum dikelompokkan dalam 3 kategori: (i) Cakupan kecil (0-35) %, (ii) Cakupan sedang (36-70) %, (iii) Cakupan besar (71-100) %. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masuk kategori sedang dengan cakupan pelayanan 59,59 %.

- Cakupan pelayanan perkotaan= 56,59 % dari jumlah penduduk.
- Cakupan Pelayanan Ibu Kota Kecamatan (IKK)
- Cakupan pelayanan pedesaan = 62,59 % dari jumlah penduduk.

Kondisi sistem sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air minum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, sudah tidak mampu lagi memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kota secara baik yang dikelola PDAM. Oleh karena itu dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Kondisi Sarana dan prasarana air minum yang ada di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk jenis pelayanan perpipaan yang pengelolaannya oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana kapasitas produksi pada tahun 2015 adalah 138,5 liter / detik.

d) Isu Strategis Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

Sistem jaringan limbah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dibedakan atas limbah cair dan limbah

padat. Penanganan limbah cair erat kaitannya dengan usaha kegiatan masyarakat terutama pada kawasan perkotaan dan kegiatan-kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan dampak. Pada dasarnya potensi timbulnya limbah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih dominan pada kegiatan-kegiatan pada kawasan perkotaan seperti rumah sakit, pasar, industri rumah tangga, dan aktivitas permukiman lainnya.

Sedangkan pada kawasan perkotaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, penanganan limbah diarahkan pada peningkatan sistem sanitasi dan penanganan limbah rumah tangga yang sering menjadi polemik untuk dilakukan penanganan lebih dini, terutama kaitannya dengan penanganan limbah tinja.

- Sistem pengolahan Air Limbah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan sistem on site (penanganan setempat) yang terbagi atas :
 - Pengelolaan oleh masyarakat/rumah tangga sendiri, dengan membuat jamban keluarga dan septictank sendiri.
 - Pengelolaan oleh pemerintah, tetapi masih terbatas pada prasarana untuk tempat umum dengan membuat MCK umum dan septikctank komunal.
- Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.

Selain belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) penanganan pembuangan air limbah sebagian besar dilakukan secara individual oleh masyarakat. Dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengolahan air limbah sehingga air buangan kota dan buangan rumah tangga, maka akan menimbulkan pencemaran pada sungai dan laut, disamping itu masih belum terpisahnya antara

drainase air hujan dengan limbah buangan rumah tangga sehingga volumenya menjadi besar yang menyebabkan kapasitas sarana yang diperlukan dalam mengolah limbah tersebut cukup besar.

Isu Isu Strategis dalam pengelolaan air limbah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijelaskan antara lain:

- Akses Masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
 - Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar diperkotaan mencapai 80,23 % dan diperdesaan mencapai 52,01 %.
 - Peningkatan kapasitas pelayanan pembuangan air limbah
 - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan
 - Pengembangan sistem pembuangan limbah komunal pada kawasan padat penduduk.
 - Belum seluruh hunian memiliki septick tank.
- Peran Masyarakat
 - Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.
 - Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman berbasis masyarakat.
- Peraturan Perundang-Undangan
 - Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah Permukiman.
 - Belum lengkapnya Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Air Limbah.

- Kelembagaan
 - Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman.
 - Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah.
 - Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan dibidang air limbah permukiman.
- Pendanaan
 - Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
 - Kurang tertariknya sektor swasta untuk di bidang air limbah.
 - Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik ditingkat Pusat maupun daerah.

7) Tinjauan Kependudukan

a) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

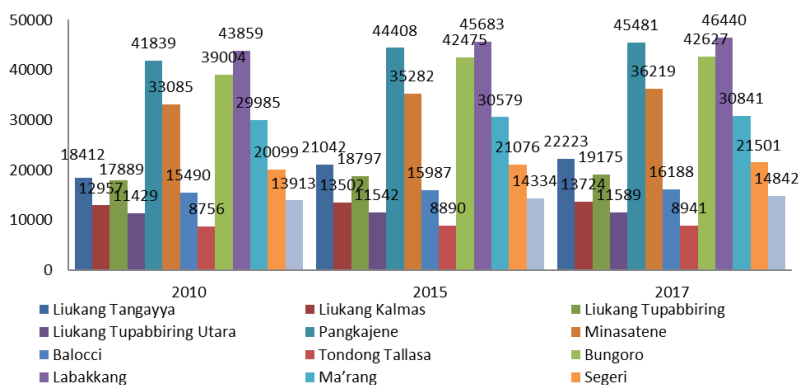
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh besarnya kelahiran kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Pangkep pada tahun 2010 sebanyak 306.717 jiwa lalu meningkat hingga tahun 2017 sebanyak 329.791 jiwa. Selain itu laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 -2017 sebesar 7,52 %. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan (tahun)				
		2010	2015	2017	2010-2017	2015-2017
1	Liukang Tangayva	18.412	21.042	22.223	20,70	5,61
2	Liukang Kalmas	12.957	13.502	13.724	5,92	1,64
3	Liukang Tupabbiring	17.889	18.797	19.175	7,19	2,01
4	Liukang Tupabbiring Utara	11.429	11.542	11.589	1,40	0,41
5	Pangkajene	41.839	44.408	45.481	8,70	2,42
6	Minasatene	33.085	35.282	36.219	9,47	2,66
7	Balocci	15.490	15.987	16.188	4,51	1,26
8	Tondong Tallasa	8.756	8.890	8.941	2,11	0,57
9	Bungoro	39.004	42.475	42.627	9,29	0,36
10	Labakkang	43.859	45.683	46.440	5,88	1,66
11	Ma'rang	29.985	30.579	30.841	2,85	0,86
12	Segeri	20.099	21.076	21.501	6,98	2,02
13	Mandalle	13.913	14.334	14.842	6,68	3,54
	Jumlah	306.717	323.597	329.791	7,52	1,91

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018



Grafik 4.1.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2017

b) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Rasio

Berdasarkan data dalam angka tahun 2018 terkait jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Pangkep. Jumlah penduduk perempuan unggul sebanyak 170.180 jiwa dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang hanya 159.611 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling banyak berada di

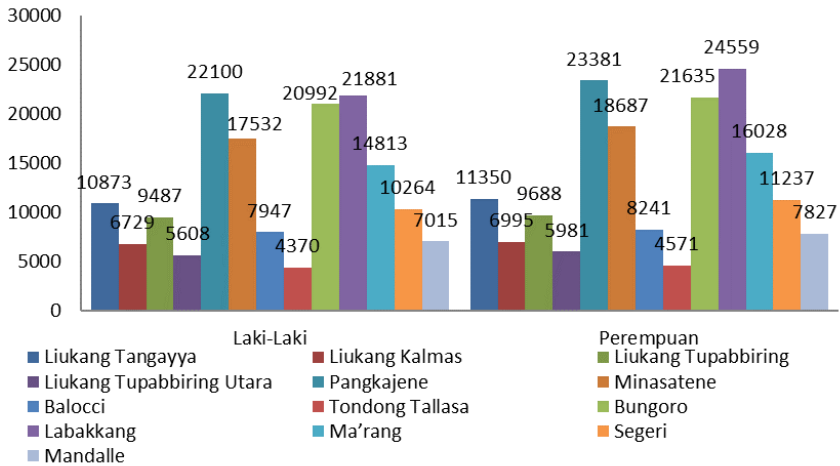
Kecamatan Labakkang yaitu 46.440 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.881 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 24.559 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tondong Tallasa yaitu sebanyak 8.941 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.370 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.571 jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan Di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Liukang Tangayya	10.873	11.350	22.223	95,80
2	Liukang Kalmas	6.729	6.995	13.724	96,20
3	Liukang Tupabbiring	9.487	9.688	19.175	97,93
4	Liukang Tupabbiring Utara	5.608	5.981	11.589	93,76
5	Pangkajene	22.100	23.381	45.481	94,52
6	Minasatene	17.532	18.687	36.219	93,82
7	Balocci	7.947	8.241	16.188	96,43
8	Tondong Tallasa	4.370	4.571	8.941	95,60
9	Bungoro	20.992	21.635	42.627	97,03
10	Labakkang	21.881	24.559	46.440	89,10
11	Ma'rang	14.813	16.028	30.841	92,42
12	Segeri	10.264	11.237	21.501	91,34
13	Mandalle	7.015	7.827	14.842	89,63
	Jumlah	159.611	170.180	329.791	93,79

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018



Grafik 4.2.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan Di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

c) Distribusi dan Kepadatan Penduduk

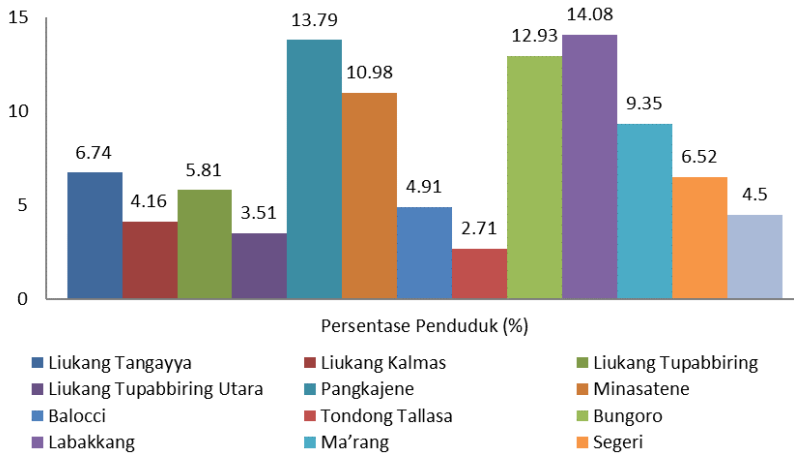
Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya (Sarwono, 1992). Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Pangkep, berada pada Kecamatan Pangkajene yang merupaka ibukota Kabupaten Pangkep, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tondong Tallasa. Lebih jelasnya terkait kepadatan penduduk di Kabupaten Pangkep sebagaimana tabel 4.6.

Tabel 4.6.

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Liukang Tangayya	6,74	185,19
2	Liukang Kalmas	4,16	149,99
3	Liukang Tupabbiring	5,81	352,22
4	Liukang Tupabbiring Utara	3,51	135,45
5	Pangkajene	13,79	959,72
6	Minasatene	10,98	473,58
7	Balocci	4,91	112,82
8	Tondong Tallasa	2,71	80,40
9	Bungoro	12,93	473,00
10	Labakkang	14,08	471,66
11	Ma'rang	9,35	410,01
12	Segeri	6,52	274,67
13	Mandalle	4,50	369,57
Jumlah		100	296,50

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018



Grafik 4.3.

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

d) Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep terbagi atas 16 kelompok umur. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten

Pangkep lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, penduduk yang memiliki jumlah terbanyak berada di kelompok umur antara 5-9 tahun yaitu sebanyak 32.493 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 16.525 jiwa dan perempuan sebanyak 15.968 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit berada di kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 5.013 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 2.051 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.962 jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait penduduk menurut kelompok umur sebagaimana pada tabel 4.7.

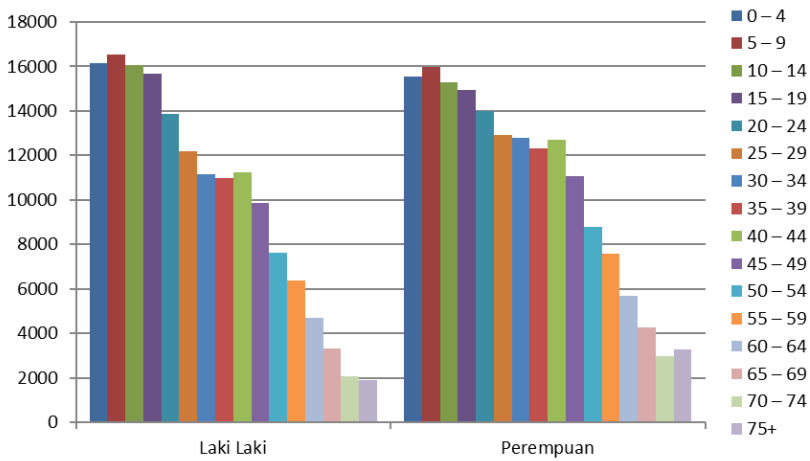
Tabel 4.7.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	16.145	15.558	31.703
5 – 9	16.525	15.968	32.493
10 – 14	16.070	15.304	31.374
15 – 19	15.657	14.956	30.613
20 – 24	13.852	13.997	27.849
25 – 29	12.165	12.937	25.102
30 – 34	11.167	12.767	23.934
35 – 39	10.961	12.316	23.277
40 – 44	11.232	12.698	23.930
45 – 49	9.876	11.060	20.936
50 – 54	7.614	8.786	16.400
55 – 59	6.389	7.599	13.988
60 – 64	4.676	5.707	10.383
65 – 69	3.330	4.273	7.603
70 – 74	2.051	2.962	5.013
75+	1.901	3.292	5.193
Jumlah	159.611	170.180	329.791

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018



Grafik 4.4.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Tahun 2017

8) Tinjauan Potensi Wilayah

Potensi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur permukiman yaitu potensi ekonomi kreatif dan pariwisata, kedua potensi termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan infrastruktur Bidang Cipta Karya diantaranya:

- a) Kawasan Perdagangan di Kota Pangkajene di Kec. Pangkajene;
- b) Kawasan Industri Kabupaten Pangkep (KIPA) di Kec. Bungoro;
- c) Kawasan Terminal Type B di Kota Pangkajene Kec. Bungoro;

Untuk Potensi Pariwisata di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memerlukan dukungan infrasturktur Bidang Cipta Karya diantaranya:

- a) Kawasan Pariwisata Budaya Arajang (Bissu) di Kec. Segeri;
 - b) Kawasan Pariwisata Alam Mattampa di Kec. Bungoro, kawasan ini merupakan Salah satu Kawasan Strategis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari segi sudut kepentingan ekonomi;
 - c) Kawasan Pariwisata Permandian Alam Amputtang di Kec. Segeri;
 - d) Kawasan Pariwisata Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yaitu Taman Purbakala Sumpang Bitu, Gua Bulu Sumi di Kec. Balocci;
 - e) Kawasan Taman Purbakala Cagar Budaya Makam Somba Labakkang di Kec. Labakkang;
- 9) Isu Strategis Sosial Ekonomi Dan Lingkungan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 9,33 % dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 10,41 %. Namun pada tahun 2015, kembali mengalami penurunan menjadi 7,63 %, lalu ditahun berikutnya meningkat sebesar 8,31 % hingga tahun 2017 menjadi 6,60 %. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Pangkep Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

Lapangan Usaha Industry		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.05	10.55	6.85	7.05	8.03
B	Pertambangan dan Penggalian	2.46	8.03	7.98	11.81	8.16
C	Industri Pengolahan	13.01	13.01	8.52	9.37	5.05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.80	18.72	-3.55	9.22	5.90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	5.95	0.37	0.34	3.28	7.65
F	Konstruksi	8.00	2.59	8.32	8.66	8.92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.18	7.30	8.67	8.96	10.45
H	Transportasi dan Pergudangan	6.33	11.52	-3.84	-2.65	11.93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.43	6.71	6.37	6.93	11.91
J	Informasi dan Komunikasi	15.05	0.22	10.68	7.84	6.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.08	4.61	7.44	15.51	1.00
L	Real Estate	9.35	12.40	7.39	6.71	8.37
M,N	Jasa Perusahaan	7.72	3.43	5.61	6.95	7.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.35	2.38	5.40	-1.07	4.91
P	Jasa Pendidikan	4.45	2.20	8.22	6.32	8.67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.20	8.99	9.66	7.09	8.92
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.92	2.93	9.33	8.33	9.55
Total		9.33	10.41	7.63	8.31	6.60

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu dalam wilayah waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, struktur ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Adapun distribusi pertumbuhan produk domestik regional bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten pangkep (Miliar rupiah) 2013-2017, tiap tahunnya mengalami peningkatan di berbagai sektor. Untuk lebih

jelasanya distribusi PDRB Kabupaten Pangkep, sebagaimana pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.

Distribusi Persentase Produk Domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pengkep (%), 2013-2017

Lapangan Usaha Industri		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.04	15.23	15.32	15.41	
C	Industri Pengolahan	53.18	53.61	53.60	53.55	52.23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
F	Konstruksi	4.42	4.15	4.14	4.28	4.49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.07	4.73	4.66	4.80	5.02
H	Transportasi dan Pergudangan	3.28	3.39	3.25	2.86	2.92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37
J	Informasi dan Komunikasi	1.52	1.21	1.21	1.21	1.23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.93	0.88	0.85	0.89	0.87
L	Real Estate	1.52	1.51	1.50	1.54	1.58
M,N	Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.41	3.27	3.27	3.00	2.97
P	Jasa Pendidikan	1.57	1.48	1.45	1.46	1.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.05	1.07	1.07	1.10	1.15
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00
Total PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018

PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Data hasil penghitungan PDRB perkapita Kabupaten Pangkep sebagaimana tabel 4.10.

Tabel 4.10.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangkep (Miliar
rupiah) 2013-2017

No.	Lapangan Usaha Industri	2013	2014	2015	2016*	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.069.73	2.432.77	2.823.08	3.168.49	3.630.28
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.169.59	1.417.42	1.699.75	1.941.84	2.061.59
3.	Industri Pengolahan	7.317.59	8.561.75	9.876.09	11.011.37	11.651.81
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.77	7.93	7.28	8.05	10.37
5.	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	4.98	5.11	5.15	5.46	6.03
6.	Konstruksi	607.63	662.56	763.29	879.33	1.002.31
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	698.21	755.87	858.61	986.48	1.120.35
8.	Transportasi dan Pergudangan	451.55	541.13	598.43	588.48	651.08
9.	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	52.49	59.42	66.08	73.49	82.34
10.	Informasi dan komunikasi	208.73	209.94	222.88	249.27	274.77
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	127.73	140.00	156.19	183.52	193.48
12.	Real Estate	209.16	242.79	276.73	316.13	663.58
13.	Jasa Perusahaan	0.78	0.86	0.97	1.08	1.22
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial	469.60	522.84	602.42	616.13	663.58
15.	Jasa Pendidikan	216.65	235.89	267.30	300.04	344.35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.80	170.39	196.60	226.84	255.81
17.	Jasa Lainnya	143.80	170.39	196.60	226.84	255.81
Total PDRB		13.759.00	15.970.12	18.426.11	20.562.66	22.309.72

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018

Tabel 4.11.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstant 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangkep (Miliar
rupiah) 2013-2017

No.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.714.85	1.895.70	2.025.50	2.168.25	2.342.35
2.	Pertambangan dan Penggalian	919.56	993.45	1.072.76	1.199.40	1.297.27
3.	Industri Pengolahan	5.771.53	6.522.20	7.077.96	7.741.44	8.123.35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.82	9.29	8.96	9.78	10.36
5.	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	4.73	4.75	4.76	4.92	5.30
6.	Konstruksi	527.20	540.86	585.84	636.55	693.34
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	622.04	667.43	725.28	790.23	872.83
8.	Transportasi dan Pergudangan	440.36	491.11	472.27	459.74	514.59
9.	Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	47.96	51.18	54.44	58.22	65.15
10.	Informasi dan komunikasi	204.19	204.63	226.48	244.24	260.85
11.	Jasa keuangan dan Asuransi	103.85	108.63	116.71	134.81	136.01
12.	Real Estate	170.52	191.66	205.82	219.63	238.01
13.	Jasa Perusahaan	0.68	0.71	0.75	0.80	0.86
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial	393.41	402.79	424.52	420.00	440.63
15.	Jasa Pendidikan	190.31	194.50	210.48	223.78	243.18
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.88	137.20	150.45	161.12	175.50
17.	Jasa Lainnya	3.58	3.69	4.03	4.37	4.78
Total PDRB		11.248.48	112.419.76	13.367.01	14.477.29	15.433.50

Sumber : Kabupaten Pangkep Dalam Angka, 2018

2 Tinjauan Wilayah Kecamatan Labakkang

1) Tinjauan letak geografis wilayah

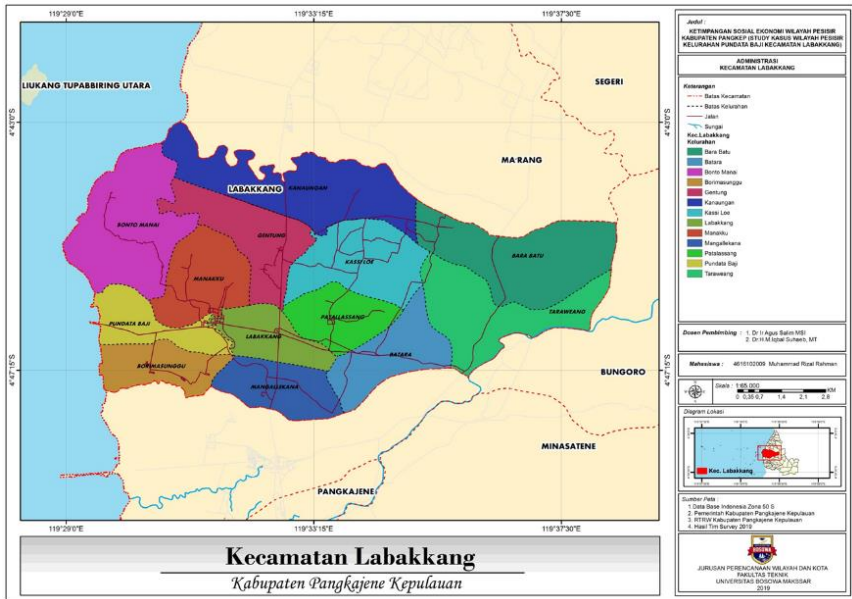
Kecamatan Labakkang yang mewakili kawasan pesisir dalam penelitian ini, memiliki luas wilayah 101,73 km² atau 12,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Pangkep. Kecamatan ini terdiri dari sembilan desa dan empat kelurahan. Secara geografis, Kecamatan Labakkang terletak di antara 4,40° - 4,45° LS dan 111° - 112° BT, dengan batas administratif sebagai berikut;

- Kecamatan Ma'rang (sebelah utara),
- Kecamatan Bungoro (sebelah timur dan selatan) dan
- Kecamatan Liukang Tupabbiring (sebelah barat).

Kelurahan Pundata Baji yang terpilih sebagai lokasi penelitian untuk kawasan pesisir secara administratif berbatasan dengan;

- Desa Manakku dan Bontomanan (sebelah utara),
- Desa Borimasunggu (sebelah selatan),
- Kelurahan Labakkang (sebelah timur) dan
- selat Makasar (sebelah barat).

Kelurahan Pundata Baji merupakan hasil pemekaran, dari Kelurahan Pundata Baji (lama) yang sekarang wilayahnya terbagi dua menjadi Kelurahan Pundata Baji dan Desa Borimasunggu. Wilayah Kelurahan Pundata Baji terdiri dua lingkungan yaitu Lingkungan Pundata dan Lingkungan Maccine Baji dengan luas wilayah 522,58 km. Lingkungan Pundata terletak di daratan sedangkan lingkungan Maccine Baji berada di pesisir.



Gambar 4.2. Peta Administasi Kecamatan Labakkang

Berdasarkan keadaan angin dan gelombang laut, Kabupaten Pangkep memiliki dua musim yaitu musim barat dan timur. Musim barat pada umumnya ditandai dengan keadaan gelombang laut yang kuat sedangkan musim timur ditandai dengan gelombang laut yang lemah. Musim barat biasanya juga diikuti dengan musim hujan yang berlangsung sejak Bulan Desember sampai dengan Maret. Pada puncak musim tersebut seringkali penduduk yang menetap di kepulauan tidak dapat berpergian akibat buruknya cuaca. Keadaan tersebut menyebabkan penduduk pulau menjadi terisolir. Musim timur sering disebut sebagai musim kering/kemarau, dimulai dari Bulan Mei sampai dengan September. Pada musim ini terjadi angin barubu dimana angin bertiup sangat kencang dan kering dari arah barat ke timur sehingga mempengaruhi kondisi perairan di sekitar Kabupaten Pangkep. Bagi penduduk yang

bermatapencaharian tergantung pada laut, musim kering merupakan masa yang menguntungkan, tetapi tidak menguntungkan bagi sebagian penduduk lainnya, khususnya petambak.

Dengan melihat topografi kedua lokasi penelitian di atas maka diperlukan moda transportasi darat dan laut untuk mencapainya dari pusat pemerintahan Kabupaten Pangkep. Moda angkutan darat yang menghubungkan kecamatan dan kota Pangkajene adalah mikrolet (pete-pete). Pete-pete juga merupakan alat angkutan antar kota dan antar desa yang menghubungkan seluruh kecamatan di daratan Kabupaten Pangkep. Kondisi jalan utama yang cukup baik, memperlancar hubungan antar desa, kecamatan dan Kota Pangkajene.

2) Tinjauan kependudukan

Tinjauan kependudukan Kecamatan Labakkang dilihat berdasarkan jumlah penduduk, rumah tangga, kepadatan penduduk dan menurut jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;

a) Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Saat ini Indonesia sedang mengalami pertumbuhan demografi yang cukup tinggi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih unggul dari usia tidak produktif, yakni kurang lebih 68% dari total populasi penduduk Indonesia.

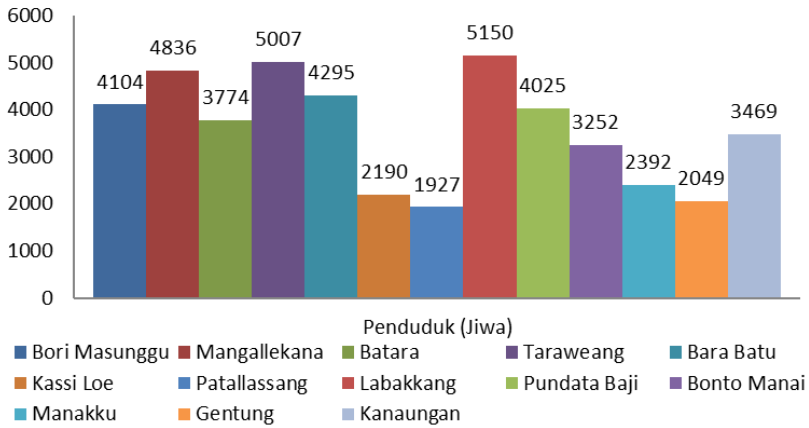
Berdasarkan data dalam angka Kecamatan Labakkang, adapun Desa/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu di Kelurahan Labakkang sebanyak 5.150 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 1.119 KK dan kepadatan penduduk 1.144 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa/kelurahan Patallasang yaitu sebanyak 1.927 jiwa, jumlah rumah tangga sebanyak 467 KK dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 262 jiwa/km². Selain itu, wilayah desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah paling besar berada di Desa Bara Batu sedangkan wilayah yang memiliki luas wilayah paling kecil berada di Kelurahan Labakkang. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.12.

Tabel 4.12.

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Desa/kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Km ² /Jiwa)
1	Bori Masunggu	821	4.104	5,22	786
2	Mangallekana	1.005	4.836	6,88	703
3	Batara	855	3.774	6,64	564
4	Taraweang	1040	5.007	9,91	505
5	Bara Batu	895	4.295	10,85	396
6	Kassi Loe	486	2.190	6,88	318
7	Patallasang	467	1.927	7,36	262
8	Labakkang	1.119	5.150	4,50	1.144
9	Pundata Baji	926	4.025	5,22	771
10	Bonto Manai	565	3.252	6,92	470
11	Manakku	557	2.392	9,08	263
12	Gentung	482	2.049	7,63	268
13	Kanaungan	808	3.469	11,37	305
Jumlah		10.026	46.440	98,46	472

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018.



Grafik 4.5.

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

b) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

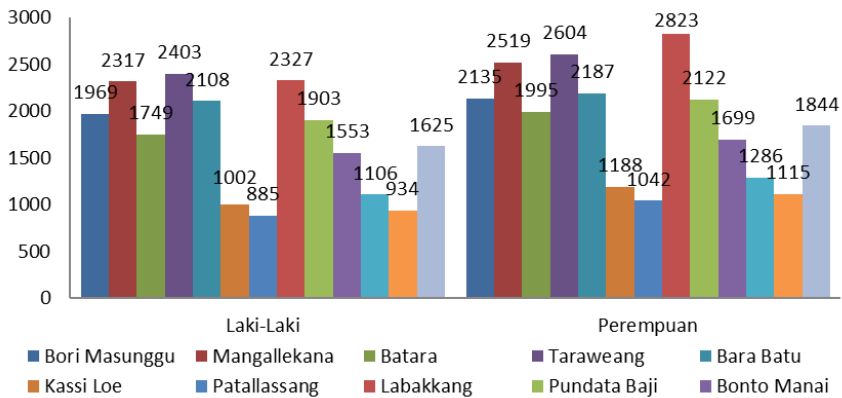
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Labakkang, dimana jumlah penduduk perempuan lebih unggul yaitu sebanyak 24.559 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.881 jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017, sebagaimana pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Desa/kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bori Masunggu	1.969	2.135	4.104
2	Mangallekana	2.317	2.519	4.836
3	Batara	1.749	1.995	3.744
4	Taraweang	2.403	2.604	5.007
5	Bara Batu	2.108	2.187	4.295
6	Kassi Loe	1.002	1.188	2.190
7	Patallasang	885	1.042	1.927
8	Labakkang	2.327	2.823	5.150
9	Pundata Baji	1.903	2.122	4.025
10	Bonto Manai	1.553	1.699	3.252
11	Manakku	1.106	1.286	2.392
12	Gentung	934	1.115	2.049
13	Kanaungan	1.625	1.844	3.469
Jumlah		21.881	24.559	46.440

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018.



Grafik 4.6.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

3) Tinjauan Potensi wilayah

Potensi perikanan budidaya Kabupaten Pangkep sangat besar dan telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga Kabupaten Pangkep menjadi salah satu sentra

produksi perikanan budidaya, khususnya ikan Bandeng. Kabupaten Pangkep Memiliki sumber daya ekosistem mangrove. Adapun luas mangrove sekitar 1.526 Km² , ekosistem padang lamun sekitar 3.875 Km², dan terumbu karang 374 Km² .

Potensi sumberdaya perikanan di Kecamatan Labakkang sesuai dan layak untuk mendukung kegiatan pengembangan perikanan tangkap. Adapun kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Labakkang sangat didominasi oleh sawah yaitu seluas 2.968 ha dan tambak seluas 3.331,49 ha, kondisi ini sangat mendukung Kecamatan Labakkang sebagai sentra produksi di sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Pangkep. Untuk Lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.

Luas lahan sawah, Lahan bukan sawah dan lahan non Pertanian menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	Sawah	Tanah kering	Ladang/Hutan	Pekarangan	Perkebunan	Padang Rumput	Kolam/Tambak	Hutan	Lainnya
1	Bori Masunggu	172	0	0	7,5	0	0	280,85	0	15,45
2	Mangalekana	380	0	18,88	52,60	0	0	0	0	287,28
3	Batara	322	5,20	100	41	128,70	0	0	0	66,60
4	Taraweang	313	18,50	186,23	51,50	157,50	0	0	0	264,17
5	Bara Batu	360	2,80	23,00	35	450	0	0	0	214,20
6	Kassi Loe	273	0	61,59	17,15	201,35	0	92,50	0	42,46
7	Patallassang	325	6,64	21,50	21,10	115,94	0	27,50	0	201,46
8	Labakkang	208	0	0	53,50	0	0	167,05	0	0
9	Pundata Baji	182	0	0	12,00	0	0	316	0	0
10	Bonto Manai	52	0	13,40	8,40	14,90	0	1.006,00	0	163,30
11	Manakku	139	0	0	19,40	8,70	0	453,00	0	71
12	Gentung	102	0	0	7,50	134,40	0	548,00	0	0
13	Kanaungan	140	0	2,00	10,80	165	0	440,84	0	281,51
Jumlah		2.968	33,14	426,60	337,45	1.376,49	0	3.331,49	0	1.607,43

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018.

4) Tinjauan sarana wilayah

a) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, dalam pengembangan sumberdaya manusia dalam suatu lembaga agar tercapai tujuan pendidikan. Adapun ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Labakkang dalam menunjang aktivitas pendidikan siswa diantaranya TK sebanyak 8 Unit, SD sebanyak 32 unit, SMP sebanyak 7 unit dan SMA sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Labakkang sebagaimana tabel 4.15.

Tabel 4.15.

Jumlah fasilitas pendidikan dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	Jumlah
1	Bori Masunggu	1	3	0	0	4
2	Mangallekana	0	3	1	0	4
3	Batara	0	3	1	0	4
4	Taraweang	1	3	0	0	4
5	Bara Batu	0	2	1	0	3
6	Kassi Loe	0	1	1	1	3
7	Patallassang	0	1	0	0	1
8	Labakkang	3	4	1	0	8
9	Pundata Baji	1	1	1	2	5
10	Bonto Manai	0	2	0	0	2
11	Manakku	0	3	1	0	4
12	Gentung	1	2	0	0	3
13	Kanaungan	1	4	0	0	5
Jumlah		8	32	7	3	50

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018

b) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu di antaranya adalah rumah sakit. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satu

indikator penting dalam pemenuhan kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah adalah pemenuhan kuantitas dan kualitas akan sarana pelayanan kesehatan pada wilayah tersebut. Adapun ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Labakkang diantaranya Rumah Sakit sebanyak 1 unit, Puskesmas 18 unit dan Posyandu sebanyak 54 unit. Lebih jelasnya terkait ketersediaan Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Labakkang, sebagaimana tabel 4.16.

Tabel 4.16.

Jumlah fasilitas kesehatan dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Rumah Sakit Bersalin	Posyandu	Jumlah
1	Bori Masunggu	-	1	-	3	4
2	Mangallekana	-	1	-	6	7
3	Batara	1	2	-	5	8
4	Taraweang	-	2	-	5	7
5	Bara Batu	-	1	-	4	5
6	Kassi Loe	-	1	-	4	5
7	Patallasang	-	1	-	3	4
8	Labakkang	-	1	-	6	7
9	Pundata Baji	-	2	-	3	5
10	Bonto Manai	-	1	-	3	4
11	Manakku	-	1	-	3	4
12	Gentung	-	2	-	3	5
13	Kanaungan	-	2	-	6	8
Jumlah		1	18	0	54	73

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018

c) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana terhadap kebutuhan rohani masyarakat yang utamanya dapat meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Adapun ketersediaan fasilitas peribadatan di Kecamatan Labakkang diantaranya Masjid sebanyak 74 unit, Langgar/Mushallah sebanyak 6 unit dan Gereja sebanyak 1 unit. Ketersediaan sarana peribadatan sangat mendukung masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, khususnya masyarakat yang beragama

muslim, dikarenakan sebagian besar masyarakat beragama islam. Untuk lebih jelasnya terkait ketersediaan fasilitas peribadatan di Kecamatan Labakkang sebagaimana tabel 4.17.

Tabel 4.17.

Jumlah fasilitas peribadatan dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	Masjid	Langgar/ Mushallah	Gereja	Vihara	Kuil/ Klenteng	Jumlah
1	Bori Masunggu	6	0	0	0	0	6
2	Mangallekana	8	0	0	0	0	8
3	Batara	7	0	0	0	0	7
4	Taraweang	7	1	0	0	0	8
5	Bara Batu	3	0	1	0	0	4
6	Kassi Loe	4	1	0	0	0	5
7	Patallassang	3	0	0	0	0	3
8	Labakkang	8	2	0	0	0	10
9	Pundata Baji	7	2	0	0	0	9
10	Bonto Manai	6	0	0	0	0	6
11	Manakku	4	0	0	0	0	4
12	Gentung	5	0	0	0	0	5
13	Kanaungan	6	0	0	0	0	6
Jumlah		74	6	1	0	0	81

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018

d) Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan sarana yang menunjang kegiatan olahraga masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan jasmani serta menumbuhkan keakraban diantara masyarakat. Kebutuhan fasilitas ini sangat diharapkan dalam lingkungan masyarakat sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan secara umum.

Adapun ketersediaan sarana olahraga di Kecamatan Labakkang diantaranya Lapangan sepak bola sebanyak 9 unit, Volley ball sebanyak 6 unit, Lapangan bulu tangkis sebanyak 5 unit, tenis meja sebanyak 6 unit. Untuk lebih jelasnya terkait ketersediaan sarana olahraga di Kecamatan Labakkang sebagaimana pada tabel 4.18.

Tabel 4.18.

Jumlah fasilitas olahraga dirinci per desa/kelurahan
di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	Sepak Bola	Volley Ball	Tenis	Bulu Tangkis	Tenis Meja	Basket	Sepak Takraw	Total
1	Bori Masunggu	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mangallekana	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Batara	1	0	0	3	2	0	0	6
4	Taraweang	1	1	0	0	2	0	0	4
5	Bara Batu	1	1	0	0	0	0	0	2
6	Kassi Loe	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Patalassang	1	1	0	0	0	0	0	2
8	Labakkang	0	1	0	0	0	0	0	1
9	Pundata Baji	1	1	0	1	1	0	0	4
10	Bonto Manai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Manakku	1	0	0	0	0	0	0	1
12	Gentung	1	1	0	1	1	0	0	4
13	Kanaungan	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		9	6	0	5	6	0	0	26

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018

e) Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan dan jasa merupakan sarana yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari sehingga diharapkan peningkatan kebutuhan sarana tersebut sebagai bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat.

Adapun ketersediaan fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Labakkang berupa pasar umum sebanyak 6 unit dan tempat pelelangan ikan sebanyak 1 unit. Ketersediaan pasar yang ada di Kecamatan Labakkang ini merupakan pasar yang melayani masyarakat Kecamatan Labakkang itu sendiri, maupun dari daerah lain, ini disebabkan karena wilayah Labakkang dilalui oleh jalan jalan poros provinsi, sehingga akses dagang masyarakat juga lebih luas.

Tabel 4.19.

Jumlah fasilitas perdagangan dirinci per desa/kelurahan di Kecamatan Labakkang Tahun 2017

No	Kecamatan	Pasar Umum	Pasar Hewan	Tempat Pelelangan Ikan	Total
1	Bori Masunggu	0	0	0	0
2	Mangallekana	0	0	0	0
3	Batara	0	0	0	0
4	Taraweang	2	0	0	2
5	Bara Batu	0	0	0	0
6	Kassi Loe	0	0	0	0
7	Patalassang	1	0	0	1
8	Labakkang	1	0	0	1
9	Pundata Baji	1	0	1	2
10	Bonto Manai	0	0	0	0
11	Manakku	0	0	0	0
12	Gentung	0	0	0	0
13	Kanaungan	1	0	0	1
	Jumlah	6	0	1	7

Sumber : Kecamatan Labakkang Dalam Angka, 2018

3 Tinjauan Wilayah Kelurahan Pundata Baji

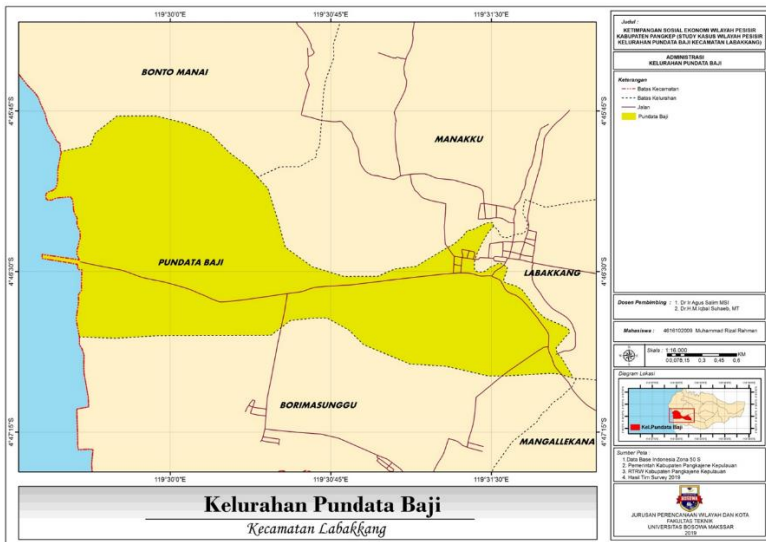
1) Tinjauan administrasi wilayah studi

Kelurahan Pundata Baji merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi wilayah, Kelurahan Pundata Baji terdiri dari Lingkungan Pundata dan Lingkungan Maccini Baji, dimana kedua lingkungan tersebut terdiri atas empat (4) RW dan 19 RT. Kelurahan Pundata Baji memiliki luas wilayah 522,58 ha. Dengan jumlah penduduk 4.025 jiwa dan jumlah keluarga 926 rumah tangga pada tahun 2017. Adapun lingkungan Pundata terletak di daratan sedangkan Lingkungan Maccini Baji terletak di Kawasan Pesisir yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 600 jiwa dan jumlah penduduk yang berprofesi mata pengcahariannya sebagai nelayan yakni 160 keluarga.

Secara adminstrasi, wilayah Kelurahan Pundata Baji sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Bonto Manai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungoro,
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah kelurahan borimasunggu,
- Sebelah Barat berbatsan dengan wilayah Selat Makassar

Jarak Kampung Maccini Baji dari Kelurahan Pundata Baji 7 Km, jarak kantor Kelurahan Pundata Baji dari kantor Kecamatan 11 Km, jarak kantor Kelurahan Pundata Baji dari kantor Kabupaten 14 Km, dan jarak yang di tempuh dari Kelurahan Pundata Baji dari kantor Provinsi 65 Km.



Gambar 4.3. Peta Administasi Kelurahan Pundata Baji

2) Tinjauan kependudukan

Berdasarkan data dalam angka Kecamatan Labakkang tahun 2017, jumlah rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji sebanyak 926 KK dengan jumlah penduduk 4.025 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 771 jiwa/km². Jumlah

penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Pundata Baji, dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak yaitu penduduk perempuan sebanyak 2.122 dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.903 jiwa.

3) Tinjauan prasarana dan sarana wilayah

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sebuah wilayah merupakan penunjang keberhasilan dalam upaya memperlancar pelayanan publik. Sarana merupakan jenis fasilitas yang mendukung aktivitas/kegiatan dan berfungsi terhadap penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi sedangkan prasarana adalah kelengkapan dasar yang mendorong terwujudnya lingkungan yang optimal dan berpengaruh terhadap aktifitas dari masyarakat sebagai pengguna prasarana.

a) Kondisi prasarana

Kondisi prasarana Kelurahan Pundata Baji dapat dikatakan bahwa merupakan kelurahan yang berada dalam tahap pembangunan. Lingkungan Pundata merupakan lingkungan yang paling mudah dijangkau bisa dikatakan bahwa sebagaimana besar jalannya telah beraspal sampai pada Lingkungan Maccini Baji sedangkan jalan poros penghubung antara kelurahan dengan jalan poros utama telah beraspal dalam kondisi baik.

Terkait prasarana pengairan di Kelurahan Pundata Baji telah memiliki saluran air yang memadai dan telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sedangkan untuk prasarana listrik sebagian besar telah terlayani pada wilayah Kelurahan Pundata Baji sehingga masyarakat dapat menikmati penerangan dari PLN. Adapun kondisi sumber air bersih di kelurahan Pundata Baji, sebagian besar masyarakat telah menggunakan air sumur dan air PAM untuk kebutuhan

sehari-hari seperti mencuci, memasak dan sejenisnya. Namun kondisi untuk ketersediaan air bersih di Lingkungan Maccini Baji sebagian besar belum tersalurkan air yang bersumber dari PDAM di lingkungan tersebut sehingga masyarakat disana untuk keperluan mencuci hanya memakai air sumur dan memasak untuk keperluan sehari-hari memakai air PDAM yang di beli seharga Rp 1000 / cergeng.

b) Kondisi sarana

- Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum merupakan sarana penunjang untuk membantu warga dalam melayani kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Pundata Baji. Untuk keperluan pelayanan masyarakat, terdapatnya kantor pemerintahan kelurahan di Erasa.

- Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan dibutuhkan oleh suatu daerah bukan hanya di daerah perkotaan namun juga di daerah pedesaan sudah memenuhi kriteria untuk tersedianya fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan merupakan aspek utama yang menjadi pilar dalam mutu pengembangan SDM. Secara umum, Kelurahan Pundata Baji telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendidikan yang ada di 2 lingkungan Kelurahan Pundata Baji yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi sebanyak 1 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 unit, sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 1 unit, SMK Negeri sebanyak 2 unit, sedangkan untuk pendidikan tingkat Universitas belum ada .

- **Sarana Kesehatan**
Sarana kesehatan berupa puskesmas telah tersedia di Kelurahan Pundata Baji sebanyak 2 unit dan posyandu sebanyak 3 unit , sarana kesehatan tersebut sangat membantu masyarakat terhadap peningkatan kesehatan sehingga peran pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan sangat diharapkan untuk masyarakat Kelurahan Pundata Baji.
- **Sarana Peribadatan**
Ketersediaan sarana peribadatan diKelurahan Pundata Baji telah dilengkapi dengan beberapa mesjid di dua lingkungan yaitu Lingkungan Pundata dan Lingkungan Maccini Baji sebanyak 7 unit sedangkan sarana peribadatan seperti gereja, pura dan tempat peribadatan lainnya untuk yang bukan beragama islam, tidak terdapat di kelurahan ini.

B. Karakteristik Ketimpangan Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Untuk mengetahui karakteristik ketimpangan perkembangan kawasan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep digunakan rasio gini atau koefisien gini yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran pendapatan yang memperbandingkan distribusi suatu variable tertentu misalnya pendapatan dengan distribusi uniform/seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut;

a. Distribusi Pendapatan Masyarakat Kelurahan Pundata Baji

Berdasarkan hasil survey lapangan, sebagian besar masyarakat utamanya pada kawasan pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan berada pada pendapatan dibawah rata-rata Rp. 1.000.000/bulan, kondisi tersebut mempengaruhi akan kebutuhan kondisi sosial ekonominya. Berdasarkan hasil analisis indeks gini ratio, total pendapatan untuk distribusi pendapatan masyarakat berdasarkan sampel penelitian yaitu sebanyak Rp. 92.300.000, dengan tingkat populasi sebesar 49,5 %, tingkat income sebesar 1,009 %, tingkat cummulative income sebesar 29,87 % dan tingkat Area Under the Lorenz sebesar 0,293. Untuk lebih jelasnya terkait distribusi pendapatan masyarakat di Kel. Pundata baji, sebaga berikut;

Tabel 4.20.

Total distribusi pendapatan masyarakat Kelurahan Pundata Baji berdasarkan sampel penelitian

Total Individual	Total Income	% pop	% inc	cumm	Area Under the Lorenz
				% inc	
98	Rp 92.300.000,00	49,5	1,009	29,87	0,293773

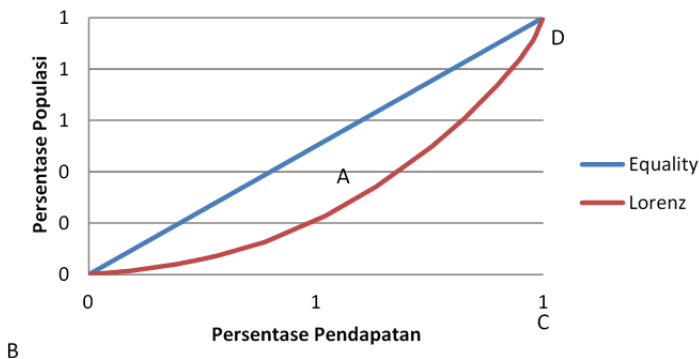
Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2019

b. Analisis tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat

Ide dasar perhitungan koefisien Gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat Kelurahan Pundata Baji dari terkecil hingga yang terbesar untuk seluruh kelompok pendapatan diantaranya nelayan, petani, buruh, pegawai swasta/negeri dan wiraswasta berdasarkan sampel yang

telah diteliti. Adapun Area A sebesar 0,2062 dan area Gini sebesar 0,4125. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin merata jika nilai Koefisien Gini akan mendekati nol (0), sedangkan semakin tidak merata distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya akan semakin mendekati angka 1 (satu) sehingga karakteristik ketimpangan sosial ekonomi pada kawasan pesisir Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep berada pada nilai Koefisien $0,4 < x < 0,5$ yaitu $0,2062 < x < 0,4125$ dengan tingkat ketimpangan sedang.

Dengan demikian, adanya tingkat ketimpangan yang sedang di Kelurahan Pundata Baji, menggambarkan bahwa adanya kesenjangan pendapatan diantara masyarakat utamanya masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dan masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai, pengusaha atau pedagang yang pendapatannya jauh diatas rata rata masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun buruh lepas.



Grafik 4.7.

Rasio perbandingan distribusi penduduk dan persentase pendapatan masyarakat di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan hasil analisis indeks gini ratio, dapat disimpulkan bahwa Area A pada hasil kurva lorenz sebesar 0,2062 dan area Gini sebesar 0,4125. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan akan semakin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0) sedangkan akan semakin tidak merata suatu distribusi pendapatan jika nilai Koefisien Gini-nya semakin mendekati satu (1) sehingga karakteristik ketimpangan sosial ekonomi pada kawasan pesisir Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep berada pada nilai Koefisien $0,4 < x < 0,5$ yaitu $0,2062 < x < 0,4125$ dengan tingkat ketimpangan sedang.

Dengan demikian, adanya tingkat ketimpangan dengan tingkat sedang di Kelurahan Pundata Baji, menggambarkan bahwa adanya kesenjangan pendapatan diantara masyarakat utamanya masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan dan masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai, pengusaha atau pedagang yang pendapatannya jauh diatas rata rata masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun buruh lepas.

C. Pengaruh Perkembangan Kawasan Pesisir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, digunakan alat analisis regresi berganda yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi sederhana. Sering kali dalam kehidupan terdapat suatu fenomena/gejala kehidupan masyarakat yang bersifat kompleksitas sehingga tidak cukup hanya menjelaskan suatu kejadian yang berdasarkan variabel tunggal saja. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel bebas yaitu (X) terhadap variabel terikat (Y) sehingga digunakan analisis Regresi Linear Berganda. Secara umum

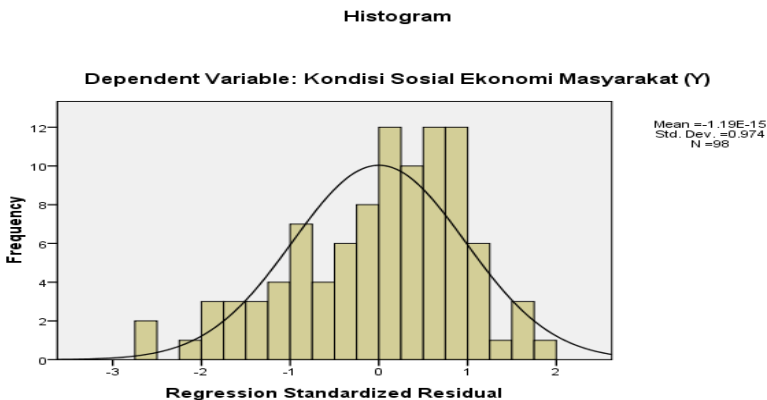
alat analisis hanya sebuah alat, sehingga interpretasi dari hasil tersebut akan dijabarkan oleh peneliti lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut;

1. Analisis keakuratan data

Berdasarkan tampilan output chart di bawah, maka dapat dilihat grafik histogram maupun grafik plot. Dimana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng kekanan yang artinya adalah data berdistribusi normal. Jika kita amati pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residu memiliki distribusi normal atau tidak, dilakukan pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut;

- 1) Data berdistribusi normal, jika nilai sig. (signifikansi) $> 0,05$
- 2) Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig. (signifikansi) $< 0,05$

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 0,877 dan Asymp.sig. sebesar 0,425 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan



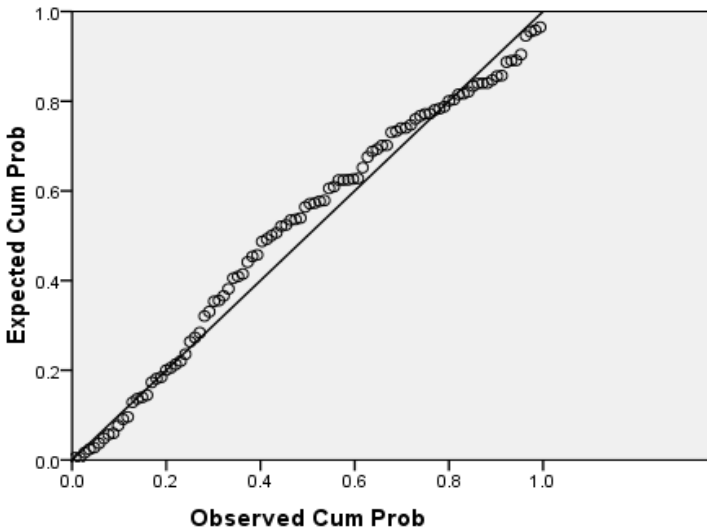
data berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya terkait uji normalitas, sebagai berikut;

Grafik. 4.8.

Histogram pada hasil Pengujian Kurva Uji t

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y)



Grafik. 4.9.

Grafik normal P-P Plot standar regresi residu

Tabel 4.21.

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15160061
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.055
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.877
Asymp. Sig. (2-tailed)		.425
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2019

2. Analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan pesisir.

Secara umum, sebanyak kurang lebih 160 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Pundata Baji utamanya pada kawasan pesisir, sangat bergantung pada hasil laut sehingga masyarakat lebih dominan berprofesi sebagai nelayan yang pendapatannya tidak menentu untuk menghidupi kebutuhan ekonominya sehingga ini yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Adapun, hasil analisis dengan uji t, dimana terdapat beberapa hipotesis yang memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkep yaitu hipotesis H2 dan H4 dikarenakan nilai sig. < 0,05, atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, sedangkan hipotesis yang tidak memiliki pengaruh yaitu H1, H3 dan H5 dikarenakan nilai sig. > 0,05, atau F hitung < F

tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 4.22.

Tabel 4.22.
Pengujian Hipotesis dengan uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.668	2.893		1.268	.208
	Pendapatan (X1)	.057	.110	.054	.514	.608
	Pendidikan (X2)	.297	.092	.333	3.241	.002
	Akses Modal (X3)	.085	.118	.083	.719	.474
	Sarana Dan Prasarana (X4)	.297	.130	.228	2.281	.025
	Pekerjaan (X5)	.110	.116	.105	.949	.345

a. Dependent Variable: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y)

Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel hipotesis dengan uji t diatas, nilai konstanta positif sebesar 3,668 yang menunjukkan pengaruh positif variabel independen (Pendapatan, Pendidikan, Akses Modal, Prasarana Dan Sarana, Pekerjaan). Bila variabel indenpenden naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat akan naik atau terpenuhi. Terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi dasar dalam merumuskan hasil hipotesis terhadap uji t, diantaranya sebagai berikut;

Diketahui nilai koefisien regresi (B) variabel Pendapatan (X1) sebesar 0,057 atau 5,7 %, variabel Pendidikan (X2) sebesar 0,297 atau 29,7 %, variabel Akses Modal (X3) sebesar 0,085 atau 8,5 %, variabel Sarana Dan Prasarana(X4) sebesar 0,297 atau 29,7 %, dan variabel Pekerjaan(X5) sebesar 0,110 atau 11,0 % terhadap variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y)

artinya jika variabel tersebut mengalami kenaikan satu satuan, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan koefisien bernilai positif yang artinya antara variabel X dan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) berhubungan positif. Kenaikan variabel (X) akan mengakibatkan kenaikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y).

Berdasarkan nilai Sig. untuk pengaruh variabel pendapatan (X1) adalah sebesar $0,608 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,514 < t$ tabel $1,98609$ sehingga X1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, tidak ada pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan faktor pendapatan. Pada umumnya, sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pesisir Kelurahan Pundata Baji adalah sebagai nelayan, adapun pendapatan masyarakat terkadang tidak menentu.

Kebijakan pembangunan kawasan pesisir dalam hal ini fasilitas dermaga di Kelurahan Pundata Baji, tidak mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat, justru sangat mengganggu aktivitas nelayan dikarenakan aktivitas bongkar muat barang di sekitar Dermaga Maccini Baji. Adapun kegiatan lain, terkadang masyarakat sebagian besar beralih profesi juga sebagai buruh rumput laut yang pendapatannya kadang tidak menentu dikarenakan sangat bergantung pada faktor cuaca, selain itu adanya oknum pemilik modal yang bekerjasama dengan masyarakat pesisir untuk tangkapan hasil laut namun dengan hasil yang tidak seimbang sehingga perlunya sebuah wadah kegiatan masyarakat yang netral dalam memberdayakan masyarakat

agar pendapatannya dapat terjamin melalui usaha dan keterampilannya.

Berdasarkan nilai Sig. untuk pengaruh pendidikan (X2) adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,241 > t$ tabel $1,98609$, sehingga X2 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, ada pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan faktor pendidikan. Adanya kebijakan pengembangan fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, sangat memberikan dampak atau pengaruh terhadap anak-anak untuk bersekolah.

Adanya kebijakan pembangunan tersebut dalam hal ini peningkatan sarana pendidikan, sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendidikan di Kabupaten Pangkep dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan anak-anaknya. Sehingga diharapkan, dengan adanya pengembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji, sangat memberikan pengaruh kuat terhadap masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan nilai Sig. untuk pengaruh akses modal (X3) adalah sebesar $0,474 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,719 < t$ tabel $1,98609$ sehingga X3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, tidak ada pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan faktor akses modal. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, bahwa pemberian akses modal untuk peningkatan ekonomi masyarakat, utamanya pada kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji tidak tepat sasaran.

Adanya kebijakan pemerintah terhadap akses modal kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan ekonomi masyarakat, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan keterampilan dalam mengelola akses modal, sehingga masyarakat memanfaatkan untuk tujuan jangka pendek. Disamping itu, keberadaan pemilik modal yang memanfaatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi laut yang salah satunya usaha rumput laut, sedangkan upah yang diterima hanya Rp. 3.500 / tali yang tentunya kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Kedepannya diperlukan sebuah pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang tidak hanya mengandalkan modal dalam mengelola usaha namun adanya keterampilan lain yang dapat bersaing dengan produk lokal untuk dipasarkan keluar daerah Kabupaten Pangkep selain bergantung hanya pada hasil laut.

Berdasarkan nilai Sig. untuk pengaruh sarana dan prasarana (X4) adalah sebesar $0,025 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,281 > t$ tabel $1,98609$, sehingga X4 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, ada pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan faktor sarana dan prasarana. Adanya kebijakan Pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana melalui bantuan salah satunya yaitu dana desa, sangat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ketersediaan fasilitas penunjang seperti sarana perdagangan, pendidikan,

kesehatan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Maka kedepannya, perlunya pengawasan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji.

Berdasarkan nilai Sig. untuk pengaruh pekerjaan (X5) adalah sebesar $0,345 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,949 < t$ tabel $1,98609$ sehingga X5 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap Y. Dengan demikian, tidak ada pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan faktor pekerjaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat pesisir yaitu sebagai nelayan. Sehingga dengan adanya perkembangan kawasan pesisir salah satunya dalam hal peningkatan sarana dan prasarana tidak memberikan dampak kepada masyarakat untuk beralih profesi dikarenakan kurangnya keterampilan kepada masyarakat untuk pengelolaan potensi hasil laut. Diharapkan adanya pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pengelolaan hasil potensi laut di Kelurahan Pundata Baji sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa X2, X4 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y sedangkan X1, X3 dan X5 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap Y. Adapun Standardized Coefficients yaitu pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel Pendapatan (X1) terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar $0,054$ atau $5,4 \%$, variabel Pendidikan (X2) terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar $0,333$ atau $33,3 \%$, variabel

akses modal (X3) terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar 0,083 atau 8,3 %, variabel sarana dan prasarana (X4) terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar 0,228 atau 22,8 %, variabel pekerjaan (X5) terhadap Kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar 0,105 atau 10,5 % .

3. Hasil pengaruh secara bersama

Berdasarkan output “ANOVA” dibawah, diketahui nilai signifikansi (Sig.) dalam uji F untuk pengaruh X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $10,447 > F$ tabel 2,31, maka sebagaimana cara pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H6 diterima yang berarti terdapat pengaruh pendapatan (X1), pendidikan (X2), akses modal (X3), sarana dan prasarana (X4), pekerjaan (X5) berpengaruh secara simultan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y). Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya terkait tabel Pengujian Hipotesis H6 dengan uji F, sebagaimana tabel 4.23.

Tabel 4.23.
Pengujian Hipotesis H6 dengan uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254.950	5	50.990	10.447	.000 ^a
	Residual	449.050	92	4.881		
	Total	704.000	97			
a. Predictors: (Constant), Pekerjaan (X5), Sarana Dan Prasarana (X4), Pendidikan (X2), Pendapatan (X1), Akses Modal (X3)						
b. Dependent Variable: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Y)						

Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2019

Berdasarkan output SPSS "Model Summary" dibawah, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,362. Nilai R Square 0,327 tersebut berawal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "R", yaitu $0,602 \times 0,602 = 0,362$. Besarnya angka koefisien detrminasi (R Square) adalah 0,362 atau sama dengan 36,2 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y) sebesar 36,2 %. Sedangkan sisanya ($100\% - 36,2\% = 63,8\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error (e). Untuk menghitung nilai error tersebut kita dapat menggunakan rumus $e=1-R^2$. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R Square ini umumnya berkisar antara 0-1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R Square bernilai minus atau negatif (-), maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi (R Square), maka ini artinya pengaruh pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R Square mendekati angka 1 (satu), maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Untuk penelitian yang menggunakan data survei (data primer) bersifat cross section maka R2 yang bernilai 0,2 atau 0,3 bisa dikatakan sudah cukup baik. Sementara untuk penelitian berdasarkan data runtut waktu (data sekunder atau data time series) maka R2 cenderung memiliki nilai yang lebih besar . Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel koefisien determinasi berikut ini;

Tabel 4.24.
Koefisien diterminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.602 ^a	.362	.327	2.20929
a. Predictors: (Constant), Pekerjaan (X5), Sarana Dan Prasarana (X4), Pendidikan (X2), Pendapatan (X1), Akses Modal (X3)				

Sumber : Hasil Analisis Penelitian, 2019

4. Kesimpulan hasil pengaruh perkembangan kawasan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uji t pada pembahasan sebelumnya, dapat diurutkan besaran pengaruh perkembangan kawasan pesisir di Kecamatan Labakkang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dari yang terbesar hingga terkecil. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pembahasan berikut;

1) Pengaruh variabel Pendidikan

Standardized Coefficients pada pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel Pendidikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,333 atau 33,3 % .

2) Pengaruh variabel sarana dan prasarana

Standardized Coefficients pada pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel sarana dan prasarana terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,228 atau 22,8 %.

3) Pengaruh variabel pekerjaan

Standardized Coefficients pada pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel pekerjaan terhadap

kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,105 atau 10,5%.

4) Pengaruh variabel Akses Modal

Standardized Coefficients pada pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel akses modal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,83 atau 8,3 %.

5) Pengaruh variabel Pendapatan

Standardized Coefficients pada pengaruh dan sumbangan efektif yang diberikan antara variabel Pendapatan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebesar 0,054 atau 5,4 %.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pendapatan, maka tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikawasan pesisir Kelurahan Pundata Baji. Pendapatan nelayan Kelurahan Pundata Baji umumnya ditentukan dengan cara bagi hasil, sehingga jarang sekali ada sistem gaji/upah tetap yang diterima oleh nelayan. Dalam sistem bagi hasil ini, yang menjadi pendapatan nelayan adalah pendapatan akan dikurangi ongkos operasional yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah biaya penjualan hasil. Untuk kegiatan bagi hasil ini terkadang kurang menguntungkan para nelayan buruh di kelurahan Pundata Baji.

Beberapa hasil penelitian (Susilo, 1987; Wagito, 1994; Masyhuri, 1996 dan 1998 dalam Mulyadi, 2007: 77) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dari pola bagi hasil tangkapan sangatlah timpang diterima antara pemilik dan awak kapal. Secara umum, system bagi hasil yang diterima pemilik dan awak kapal adalah berbanding 70:30.

Akan tetapi, porsi yang diterima buruh kapal harus dibagi lagi dengan sejumlah buruh kapal lainnya yang terlibat dalam aktivitas di kapal. Semakin banyak jumlah awak kapal, semakin kecil bagian yang diperoleh setiap awaknya (Mulyadi, 2007:77). Pada umumnya, nelayan di Kelurahan Pundata Baji mengalami keterbatasan teknologi penangkapan sehingga wilayah operasi penangkapan pun menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Selain itu, ketergantungan terhadap kondisi cuaca/musim sangat berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan para nelayan, terutama pada kondisi ombak cukup tinggi, yang berlangsung lebih dari satu bulan. Akibatnya berpengaruh terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Kondisi tersebut jelas tidak akan menguntungkan para nelayan karena secara rata-rata pendapatan yang tidak menentu tiap harinya, sehingga pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat musim paceklik.

Banyaknya hasil tangkapan tercermin pula pada besarnya pendapatan yang diperoleh dan pendapatan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum (kfm) sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima (Sujarno, 2008) .

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pendidikan, maka terdapat pengaruh pendidikan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikawasan pesisir kelurahan Pundata Baji. Pada umumnya nelayan di Kelurahan Pundata Baji bertipe keluarga inti dimana keluarga hanya terdiri dari orang tua dan anak. Dalam hal penilaian terhadap pentingnya pendidikan formal bagi anak, banyaknya jumlah tanggungan tidak begitu berpengaruh tetapi lebih berpengaruh terhadap

perilaku responden dalam menyekolahkan anak. Hal itu terjadi karena jumlah tanggungan suatu keluarga sangat berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pendidikan. Sebaran tingkat pendapatan yang tidak merata disebabkan oleh status dari nelayan itu sendiri. Untuk tingkat pendapatan tinggi didominasi oleh pemilik perahu terutama nelayan utama dan nelayan yang memiliki anggota keluarga yang bekerja (misalnya istri sebagai bakul ikan) sedangkan untuk tingkat pendapatan rendah didominasi oleh nelayan penuh (anggota keluarga lainnya tidak ada yang bekerja).

Secara umum persepsi keluarga nelayan yang diwakili oleh kepala keluarga mempersepsikan bahwa pendidikan formal merupakan suatu hal yang penting untuk anak-anaknya. Bagi para nelayan menyekolahkan anak adalah untuk bekal hidup anak di masa yang akan datang dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan memperoleh penghidupan yang lebih baik dari kondisi orang tuanya. Seperti yang diungkapkan (Heryanto,1998) usia dapat mempengaruhi pada cara seseorang berfikir mempersepsi dan menyikapi sesuatu yang menjadi objeknya. Dalam persepsi serta penilaian masyarakat pesisir terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia produktif, mereka sangat memberikan penilaian yang positif terhadap pendidikan formal anaknya yang ingin melanjutkan Pendidikan dikarenakan menurut persepsi mereka dengan jalur pendidikanlah ekonomi keluarga dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Kementerian Pendidikan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mendapatkan penghargaan dibidang pendidikan dikarenakan menjadi satu-satunya daerah pemberi beasiswa terbanyak di Indonesia. Hal ini

diungkapkan oleh Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana usai menerima penghargaan tersebut (15/12/2018) di Jakarta, menurutnya hal itu sangat membuatnya semakin bangga, sebab dari seluruh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia yang memprogramkan beasiswa, Kabupaten Pangkep satu-satunya yang dianugrahi penghargaan tersebut. Pemerintah pusat mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep sebagai pemberi beasiswa mahasiswa dengan jumlah penerima terbanyak se-Indonesia. Dalam penilaiannya, Pemerintah Kabupaten dianggap membantu peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Selain itu, Pemerintah daerah Kab. Pangkep bukan hanya memberikan beasiswa SPP Gratis kepada Mahasiswa yang kuliah di Universitas Kabupaten Pangkep saja ataupun Universitas yang ada di Sulawesi Selatan namun juga mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, Bahkan Pemerintah Kabupaten Pangkep juga membangun MoU (Memorandum of Understanding) dengan perguruan tinggi di luar negeri seperti Kairo dan China.

Maka dengan prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kembali manambah anggaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp.19 Miliar dimana pada APBD pokok 2018 lalu Pemkab Pangkep menganggarkan Rp 15 miliar. Alokasi anggaran untuk mahasiswa ini sehubungan dengan program unggulan tentang pemberian bantuan SPP gratis bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri /swasta asal Pangkep di manapun Mahasiswa tersebut kuliah mulai semester 1 hingga semester 8 sehingga faktor tersebut yang memicu anak usia produktif

untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, dengan demikian setelah mereka menimba ilmu di perguruan tinggi mereka kembali ke kampung halamannya untuk menerapkan ilmu tersebut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi hasil SDA.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh akses modal, maka tidak terdapat pengaruh akses modal terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikawasan pesisir kelurahan Pundata Baji. Kemiskinan nelayan mengandung kerentanan dan ketidakberdayaan (Sutrisno dalam Mulyadi, 2005:49). Kerentanan terhadap kondisi darurat seperti ketika terjadi perubahan musim yang sangat ekstrem, nelayan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak mampu bekerja, dan itu berarti tidak mendapatkan penghasilan. Serta ketidakberdayaan karena tidak mampu keluar dari kemiskinannya akibat terbatasnya keterampilan dan modal yang dimiliki. Modal usaha bagi nelayan antara lain kapal, alat tangkap, bahan bakar, alat pengawet, alat pengolah yang kesemuanya itu tidak sedikit jika dinominalkan.

Bagi nelayan Maccini Baji dalam satu tahun hanya sekitar sembilan bulan dengan rata-rata melaut hanya 20 hari perbulan, dari waktu produktifnya. Hal ini tentunya akan memperkecil pendapatan yang akan diperoleh nelayan perbulannya. Seringkali pendapatan yang diperoleh pada musim ikan akan habis dikonsumsi ketika musim paceklik tiba. Sementara alat tangkap dan sarana pengawet yang memang sangat diperlukan oleh nelayan karena kondisi sumber daya perikanan yang bersifat mobile dan mudah rusak, pada umumnya tidak dimiliki oleh nelayan Maccini Baji. Sebagian

nelayan Maccini Baji melaut menggunakan perahu tanpa motor dengan teknologi penangkapan yang sederhana menggunakan alat berupa jaring, pancing, cedok, candid, jaring ketam, bubu, pukut bilis dan rawai. Dengan alat pengawet yang sederhana yaitu menggunakan box styrofome dengan balok es dan teknologi pengolahan ikan pun masih sangat sederhana. Jika dilihat dari sisi kepemilikan alat tangkap, banyak nelayan Maccini Baji yang merupakan nelayan buruh . Tidak semua nelayan Maccini Baji memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya, yaitu menjadi buruh nelayan. Kondisi ini menjadi lebih buruk ketika sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan juragan cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh. Di hampir semua pulau yang ada di Kabupaten Pangkep, selalu ada nelayan buruh dan nelayan juragan, yang lebih dikenal sebagai “punggawa”. Para punggawa inilah yang selama ini memberi modal melaut bagi nelayan, seperti untuk membeli bahan bakar, rokok, es dan kebutuhan lain saat melaut. Kemudian hasil tangkapan nelayan ini didaratkan dan dijual di pelantaran dermaga TPI Maccini Baji dengan dipotong modal yang telah diberikan. Hasil tangkapan nelayan dijual di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Dermaga Maccini Baji karena telah tersedia dikawasan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995) yang lebih menekankan pada pemberdayaan manusia dengan

mengendalikan kehidupan mereka dan sumber dayanya, menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya, dan secara langsung mereka dapat mengejar pembangunan sebagai suatu upaya kesejahteraan, yang merupakan tujuan akhir dari “people centered development” (Korten, 1984). Pendekatan pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Soetomo, 2011:5).

Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2011:65-66). Dengan demikian, masyarakat lokal dapat memiliki akses dan kontrol tidak hanya terhadap pengambilan keputusan, tetapi juga terhadap sumberdaya. Mengapa proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal? Karena masyarakat pada tingkat lokal yang diperhitungkan paling menanggung akibat dari pelaksanaan pembangunan yang diputuskan, termasuk risiko kegagalan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Banyak program pembangunan yang dijalankan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada lapisan bawah. Seringkali program pembangunan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak diikutkannya masyarakat dalam proses perencanaan terhadap program pembangunan yang akan dijalankan. Program-program pembangunan semacam itu menempatkan masyarakat hanya sebagai objek dalam pembangunan dan program lebih bersifat top-down.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sarana dan prasarana, maka terdapat pengaruh sarana dan prasarana terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikawasan pesisir kelurahan Pundata Baji. Salah satu kemajuan pembangunan daerah adalah peningkatan terhadap pembangunan sarana dan prasarana. Pada wilayah Kelurahan Pundata Baji, telah meningkatnya perbaikan prasarana dan sarana seiring kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan infrastruktur sehingga membantu kebutuhan masyarakat kelurahan Pundata Baji terhadap kegiatan perdagangan, pendidikan kesehatan, dan peribadatan sehingga fakta inilah yang mendorong peningkatan perkembangan kawasan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dikarenakan tersedianya akses telekomunikasi (internet) yang memudahkan didalam pengembangan ekonomi wilayah sehingga masyarakat dapat saling berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk yang tiap tahunnya meningkat sehingga perlunya penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan pesisir Kelurahan Pundata Baji.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pekerjaan, maka tidak terdapat pengaruh pekerjaan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat dikawasan pesisir kelurahan Pundata Baji. Pada umumnya, nelayan tradisional Pundata Baji cukup terampil menggunakan peralatan dengan sarana penangkapan ikan dan kemampuan yang seadanya namun seringkali sulit untuk mengembangkan ke peralatan yang

lebih modern. Kondisi ekonomi nelayan Pundata Baji yang cukup rendah disebabkan modal yang terbatas sehingga produktivitas terhadap hasil tangkapan ikan sangat kurang diakibatkan pengaruh musim yang tidak menentu, selain itu juga dengan jaminan pemasaran ikan yang tidak menentu diakibatkan adanya kendala dalam penentuan harga jual pada tingkat nelayan. Hal lain yang juga menarik adalah kondisi psikologis dan sosologis masyarakat nelayan, umumnya berada dalam lingkungan hidup sosial yang cenderung tidak memikirkan hari depannya, dan karenanya kurang kesadaran untuk menyimpan sebagian pendapatan yang diperolehnya terutama pada saat musim ikan (Purwaka, 2000).

Hasil penelitian menyatakan bahwa segala kemiskinan, keterbelakangan, dan kekumuhan yang terjadi di masyarakat nelayan Pundata Baji karena ketidakmampuan sumber daya yang dimiliki, dan manajemen keluarga nelayan dalam pengelolaan uang dari hasil penangkapan ikan. Dampak yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu mereka masih mengalami kehidupan yang serba kekurangan. Dalam menyikapi hal tersebut, masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi dan untuk mempertahankan hidup maka langkah yang ditempuh, yaitu mengandalkan utang pada tetangga, juragan, keluarga, dan sesama nelayan. Cara demikianlah yang secara umum dipakai dalam kehidupan nelayan. (Miky S. Natun, 2005). Untuk mengembangkan kemampuan nelayan terhadap penyediaan sarana permodalan dalam usaha penangkapan ikan, maka diperlukan keterlibatan beberapa lembaga keuangan seperti koperasi dan bank-bank pemberi kredit dengan ditopang sistem pemasaran yang jelas. Selain itu, diperlukan adanya

lembaga yang dapat ikut serta di dalam peningkatan kualitas SDM nelayan, dengan berbagai macam program diantaranya, pelatihan peningkatan keterampilan menangkap ikan, kemampuan berwirausaha yang baik dan benar serta beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya (Purwaka, 2000).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwan F. Aritenang. 2010. A Study on Indonesia Regions Disparity Post Decentralization, MRPA Paper No. 25245.
- Amijaya, Deny Tisna. 2008. Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003-2004. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: UNDIP
- Arief Yusuf, Mark Horridge, Edimon Ginting, Priasto Aji. 2014. *Reducing Disparity Through a Regions-ocused Development: A Modeling Approach of Assessing the Indonesia MP3I*, Working Paper in Economics and Development Studies No. 201402, Bandung: Departement of Economics, Padjadjaran University.
- Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2017.
- Badan Pusat Statistik Kelurahan Pundata Baji Dalam Angka 2018 Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.
- Bappenas, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta.
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Chambers, Robert.1995. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Yogyakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)

- Chriswardani, Suryawati. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol 8/No.03/ september/2005. Hal: 121-129. <http://www.jmpk-online.net>.
- David C. Korten, 1984, *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan*, dialihbahasakan oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Studi Pembangunan, Jakarta
- Hartono, Budiantoro, 2008, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip. Semarang.
- Heryanto N. 1998. *Partisipasi Orang Tua dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Oasar 9 Tahun*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pascasa~ana.
- Lukman Harun dan Ghozali Maski. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Masyhuri. 1996. *Menyisir pantai Utara*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Meika Purnamasyari. 2010. *Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Periode Tahun 2001-2008 di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Michael Parkin. 2008. *Economics 8th Edition*, Toronto: Perason International Edition.
- Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Munawir Ismail. 1995. *Teori Pertumbuhan dan Pemerataan*, Prisma tahun XXIV No. 1.
- Mudrajat Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Natun, Miki O. S (2005), *Kehidupan Rumah Tangga Nelayan Dalam Kemiskinan, Ketrbelakangan dan Kekumuhan di Kelurahan Oesapa Kota Kupang* Program Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia.
- Purwaka, T., 2000. *Pembangunan Sumberdaya Manusia Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Pengelolaan Kelautan di Daerah*. Seminar Sehari, IPB, Bogor.
- Pradono, G. S. dan Purnamasari, S. E. 2010. *Hubungan antara Penyesuaian Diri dengan Kecemasan dalam Menghadapi Masa Pensiun pada Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. (Diunduh pada 20 November 2019)
- Rahmawati, Y. I. 2006 *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan* <https://sarulmardianto.wordpress.com/2012/04/24/> (diakses pada tanggal 24 April 2020)
- Ravallion, Martin, & Huppi, Monika (Januari 1991); *—Measuring Changes in Poverty: A Methodological Case Study of Indonesia during an Adjustment Period*”, The World Bank, Washington D.C.

- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017-2021.
- Renggapratiwi, Amleia. 2009. Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan. Tesis diajukan kepada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Siregar, Herminto dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/siregar21lagts07.pdf>
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinah Muncul Antitesisnya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarno. 2008. peranan tenaga kerja, modal, dan teknologi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten pемalang. Skripsi dipublikasikan. Semarang: jurusan ekonomi pembangunan, fakultas ekonomi universitas negeri semarang.
- Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Tambunan, T. TH. (2014). "Perekonomian Indonesia". Yogyakarta: BPFE
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wagito, 1994. "Dampak Motorisasi Perahu Nelayan dan Penyempurnaan Alat Tangkap Terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Ketersediaan Sumber Daya Ikan di Muncar, Banyuwangi, "dalam lingkungan dan Pembangunan No. 1 (14), 1994.

World Bank. 2006. *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: World Bank.

<https://materiips.com/faktor-ketimpangan-sosial>

<http://bag-pemerintahan.com/kecamatan-labakkang/>

<http://www.beritakota.id/2017/11/mengeluh-kesulitan-air-bersih-warga.html>